



INSTALASI SISTEM PERTAHANAN RUDAL *TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE* (THAAD) AMERIKA SERIKAT DI KOREA SELATAN

The Installation of Rudal Defense System Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) of United States in South Korea

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Rahmalia Ayu Widayanti

NIM 130910101055

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



INSTALASI SISTEM PERTAHANAN RUDAL *TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE* (THAAD) AMERIKA SERIKAT DI KOREA SELATAN

The Installation of Rudal Defense System Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) of United States in South Korea

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Rahmalia Ayu Widayanti

NIM 130910101055

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, Ayah Suwito Adi dan Ibu Toyani. Semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kalian berdua.
2. Nenek saya, Mbah Taminah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang.
3. Adik saya, Rahmanul Hofiadi Putra. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam urusannya dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Seluruh guru dan pengajar yang pernah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga segala amal baik kalian dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan yang bermanfaat.
5. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Teman-teman dekat saya dari SMP, Devina Sella; Manika; Novita; Rizky; Fendi; Jimi; dan Jurais. Terima kasih telah memberikan semangat dan doa.
7. Teman-teman kos, Anna Rizq; Nova Arnis; Irma Laily; Marina; Dwi Arisandi; Ulil; dan Reni. Terima kasih telah menemani dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi.
8. Teman-teman dekat di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Claudia Putri; Evira Diah; Farwa Fatima; Lisa Riska; Merinda; Nur Safura; dan Tamara. Terima kasih selalu menemani dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi.

MOTTO

Kamu boleh memilih antara melindungi dirimu sendiri, tetap bersembunyi, atau menyelamatkan.*)

And incline not to the disbelievers and the hypocrites. Disregard their annoying talk, and put your trust in Allah. Allah is sufficient as Trustee.
(terjemahan Surat Al-Ahzab ayat 48)**)

All is well
(terjemahan salah satu dialog dalam film Three Idiots***)

*) Yulistiana, Ary dan Yudhi Herwibowo. 2015. *Cameo Revenge*. Yogyakarta: Gramedia Widiasarana.

***) Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

****) Hirani, Rajkumar dan Abhijat Joshi. 2009. *3 Idiots*. India: Vinod Chopra Films.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmalia Ayu Widayanti
NIM : 130910101055
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Instalasi Sistem Pertahanan Rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan”** adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya tulis ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan

Rahmalia Ayu Widayanti
130910101028

SKRIPSI

**INSTALASI SISTEM PERTAHANAN RUDAL *TERMINAL HIGH
ALTITUDE AREA DEFENSE* (THAAD) AMERIKA SERIKAT DI KOREA
SELATAN**

**THE INSTALLATION OF RUDAL DEFENSE SYSTEM TERMINAL
HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) OF UNITED STATES IN
SOUTH KOREA**

Oleh:

Rahmalia Ayu Widayanti

130910101055

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Agus Trihartono, S. Sos, MA., Ph.D.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. M Nur Hasan, M. Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Instalasi Sistem Pertahanan Rudal *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* Amerika Serikat di Korea Selatan**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal :

Waktu :

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Agung Purwanto, M.Si.
NIP. 196810221993031002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Agus Trihartono, S.Sos, MA., Ph.D.
NIP. 196908151995121001

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
NIP. 195904231987021001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS.
NIP. 19601015989031002

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197212041999031004

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M. Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Instalasi Sistem Pertahanan Rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan; RahmaliaAyu Widayanti; 130910101055; 2018; 107 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Korea Selatan merupakan salah satu negara hasil perpecahan Semenanjung Korea. Masa lalu yang buruk membuat Korea Selatan dan Korea Utara tidak dapat menciptakan reunifikasi hingga saat ini. Ambisi nuklir Korea Utara yang besar membuat kekhawatiran dan ketakutan Korea Selatan meningkat. Akibatnya, Korea Selatan terdorong memiliki sistem anti rudal yang mampu menandingi kecanggihan rudal Korea Utara. Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara yang menjamin pertahanan dan keamanan Korea Selatan mendorong Seoul untuk memasang sistem pertahanan anti rudal THAAD di wilayahnya. Meskipun awalnya ditolak, Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye, akhirnya menerima sistem THAAD yang dipasang di wilayah Seongju, Korea Selatan. Kebijakan tersebut menerima banyak tanggapan negatif, baik dari dalam maupun luar negeri. Cina sebagai mitra ekonomi utama Korea Selatan mengutuk rencana tersebut dan mulai memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan setelah rencana itu direalisasikan. Protes juga datang dari orang-orang di Seongju, daerah di mana sistem THAAD ditempatkan. Mereka khawatir tentang dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sistem THAAD dan penyebaran daerah pemukiman mereka untuk serangan rudal dari Korea Utara. Artikel ilmiah ini akan membahas alasan yang mendasari sistem anti rudal THAAD Korea Selatan di samping semua konsekuensi yang diterimanya.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti alasan yang menyebabkan Korea Selatan memasang sistem pertahanan rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) Amerika Serikat adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Untuk proses analisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif guna menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan alasan yang menyebabkan Korea Selatan memasang sistem pertahanan rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) Amerika Serikat di samping segala konsekuensi yang diterimanya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa alasan yang menyebabkan Korea Selatan memasang sistem pertahanan anti rudal THAAD Amerika Serikat adalah karena dilema keamanan yang terjadi di Semenanjung Korea. Alasan kedua adalah karena pentingnya aliansi militer dengan Amerika Serikat demi melindungi pertahanan dan keamanan wilayah negara dari ancaman Korea Utara.



PRAKATA

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Instalasi Sistem Pertahanan Rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua, Ayah Suwito Adi dan Ibu Toyani yang sudah menjadi panutan dan tempat belajar yang luar biasa dalam hidup, serta terima kasih untuk semua doa, kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa.
2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Agus Trihartono, S. Sos, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. M Nur Hasan, M.Hum, selaku dosen pembimbing anggota yang sudah sabar dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik yang telah sabar dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing penulis selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Teman-teman Hubungan Internasional 2013 yang telah menjadi teman sekaligus partner diskusi dalam kuliah.

Terima kasih banyak untuk semua bantuan dan dukungan semua pihak

selama ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, dan tidak berlebihan kiranya apabila penulis menyelipkan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Rahmalia Ayu Widayanti

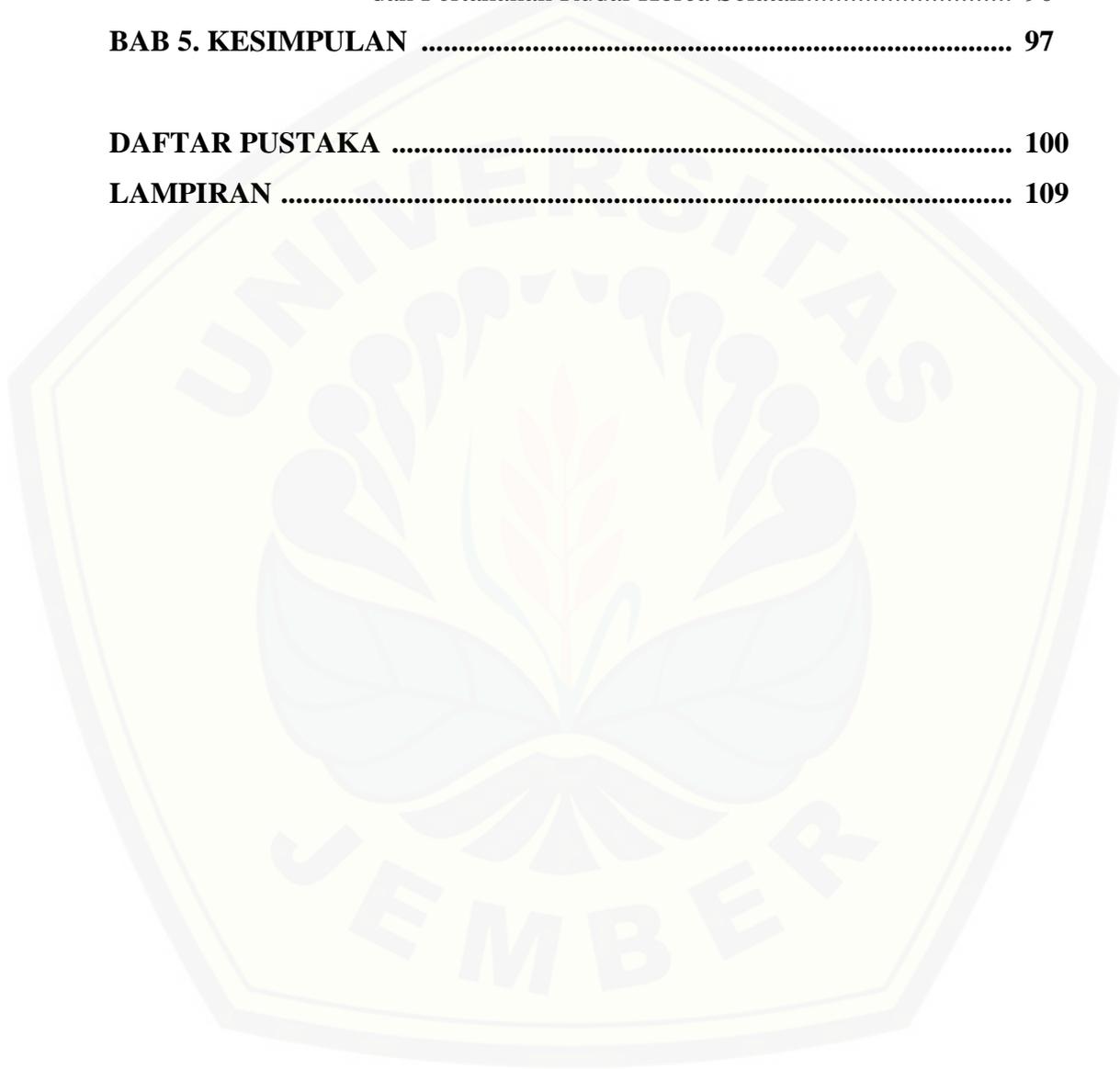


DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMBUTAN | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| RINGKASAN | vii |
| PRAKATA | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR DIAGRAM | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN | xvii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan..... | 8 |
| 1.2.1 Batasan Materi | 8 |
| 1.2.2 Batasan Waktu | 9 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.5 Kerangka Konseptual..... | 10 |
| 1.5.1 Konsep Dilema Keamanan | 11 |
| 1.5.2 Konsep Aliansi Militer..... | 14 |
| 1.6 Argumen Utama..... | 17 |
| 1.7 Metode Penelitian | 17 |
| 1.7.1 Teknik Pengumpulan Data..... | 17 |
| 1.7.2 Teknik Analisis Data | 18 |

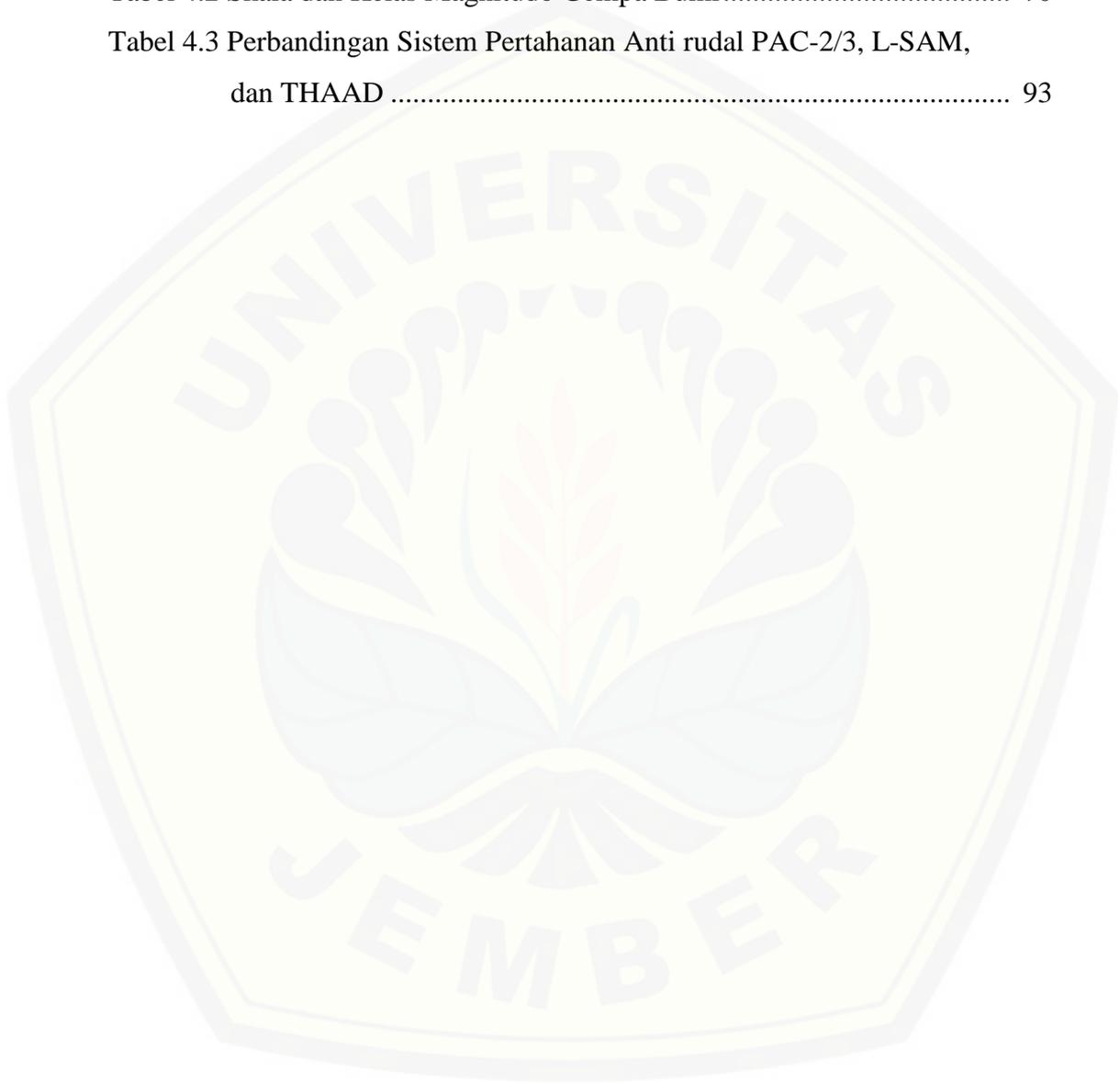
| | |
|---|-----------|
| 1.8 Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB 2. KONSTELASI POLITIK LUAR NEGERI DAN KEAMANAN KOREA SELATAN DI SEMENANJUNG KOREA | 20 |
| 2.1 Posisi Tawar (<i>Bargaining Position</i>) Korea Selatan di Asia Timur | 21 |
| 2.1.1 Korea Selatan di bawah Pemerintahan Otoriter (1948 – 1987)..... | 22 |
| 2.1.2 Korea Selatan di bawah Pemerintahan Demokratis..... | 24 |
| 2.2 Program Nuklir Korea Utara sebagai Tantangan Keamanan Korea Selatan di Semenanjung Korea | 29 |
| BAB 3. ALIANSI MILITER DAN PERTAHANAN KOREA SELATAN DAN AMERIKA SERIKAT | 41 |
| 3.1 Sejarah Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat | 41 |
| 3.2 Aliansi Militer dan Keamanan Amerika Serikat dan Korea Selatan Pasca Perang Korea..... | 43 |
| 3.3 Tantangan Korea Utara terhadap Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat | 51 |
| 3.4 Kehadiran Cina dalam Hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat | 57 |
| BAB 4. ALASAN KOREA SELATAN MEMASANG SISTEM PERTAHANAN ANTI RUDAL <i>TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE</i> (THAAD) AMERIKA SERIKAT | 60 |
| 4.1 Peningkatan Potensi Ancaman Senjata Nuklir Korea Utara bagi Korea Selatan dan Amerika Serikat..... | 61 |
| 4.1.1 Mengurangi Keamanan Pihak Lain | 71 |
| 4.1.2 Mengurangi Keamanan Semua Pihak..... | 74 |
| 4.1.3 Ketidakpastian Tujuan | 77 |
| 4.1.4 Tidak Adanya Kebijakan yang Cocok..... | 79 |
| 4.2 Sistem Pertahanan Rudal <i>Terminal High Altitude Area Defense</i> (THAAD) dalam Konsep Aliansi Militer Korea Selatan dan | |

| | |
|---|------------|
| Amerika Serikat | 81 |
| 4.2.1 Kapabilitas Militer Korea Selatan dan Korea Utara | 86 |
| 4.2.2 Fungsi Aliansi <i>Augmentive</i> dalam Kapabilitas Militer dan Pertahanan Rudal Korea Selatan..... | 90 |
| BAB 5. KESIMPULAN | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
| LAMPIRAN | 109 |



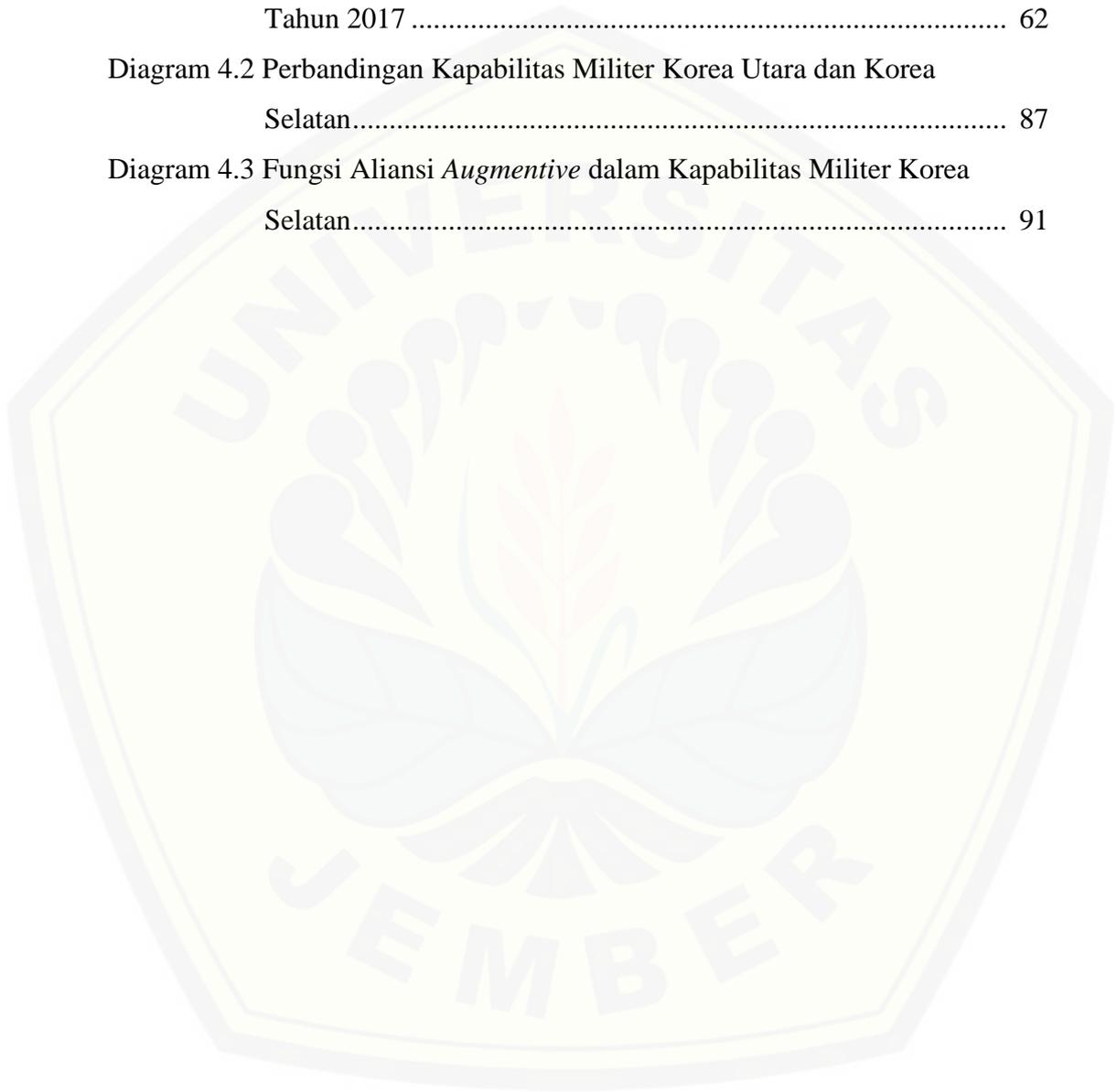
Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Pengayaan Plutonium Korea Utara | 68 |
| Tabel 4.2 Skala dan Kelas Magnitudo Gempa Bumi | 70 |
| Tabel 4.3 Perbandingan Sistem Pertahanan Anti rudal PAC-2/3, L-SAM, dan THAAD | 93 |



Daftar Diagram

| | |
|--|----|
| Diagram 4.1 Uji Coba Misil Korea Utara dari Tahun 20016 hingga Tahun 2017 | 62 |
| Diagram 4.2 Perbandingan Kapabilitas Militer Korea Utara dan Korea Selatan..... | 87 |
| Diagram 4.3 Fungsi Aliansi <i>Augmentive</i> dalam Kapabilitas Militer Korea Selatan..... | 91 |

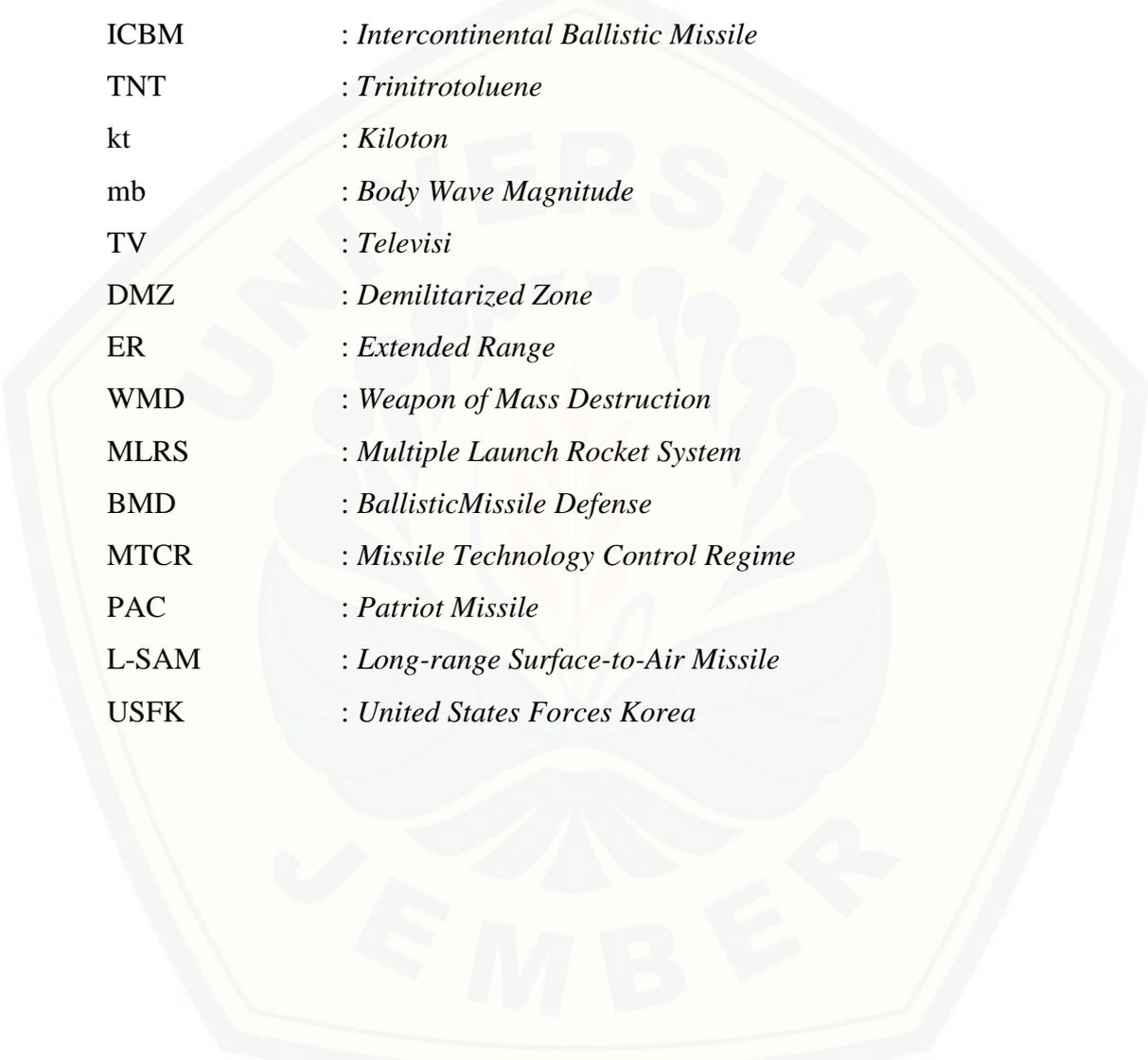


Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Hubungan antara teori, proposisi, dan konsep | 10 |
| Gambar 2.1 Unit pasukan payung Tentara Rakyat Korea, melakukan latihan menyerbu replika Gedung Biru yang merupakan kantor presiden Korea Selatan | 30 |
| Gambar 3.1 Peta Perang Korea dari tahun 1950 hingga 1953 yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu awal, pertengahan, dan akhir perang | 42 |
| Gambar 3.2 Penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Korea-Amerika yang Diadakan di Universitas Kyungsang Tahun 1953 | 44 |
| Gambar 3.3 Sistem Pertahanan Rudal THAAD Amerika Serikat | 50 |
| Gambar 3.4 Cara Kerja Sistem THAAD | 51 |
| Gambar 4.1 Jenis Rudal yang Telah Dikembangkan Korea Utara | 65 |
| Gambar 4.2 Perkiraan Besar Jangkauan Misil Balistik Korea Utara | 66 |
| Gambar 4.3 Hasil Kekuatan Ledakan Uji Coba Nuklir Korea Utara..... | 68 |
| Gambar 4.4 Pengiriman Radar dan Peralatan Lain dari Sistem Pertahanan Anti Rudal THAAD ke Titik Pengerahannya di Wilayah Selatan Korea Selatan | 84 |
| Gambar 4.5 Yoo Jeh-Seung, Wakil Menteri Untuk Kebijakan di Kementerian Pertahanan Nasional, Membuat Pengumuman tentang Peluncuran Sistem Pertahanan Rudal THAAD ke Korea pada Hari Jumat di Seoul | 85 |
| Gambar 4.6 Perbedaan Sietem Pertahanan Rudal THAAD dengan PAC-3 dan L-SAM saat mencegat misil Korea Utara yang masuk ke wilayah Korea Selatan | 95 |

Daftar Singkatan

| | |
|-----------|---|
| THAAD | : <i>Terminal High Altitude Area Defense</i> |
| EA | : <i>Environmental Assessment</i> |
| NPT | : <i>Non-Proliferation Treaty</i> |
| PLTA | : <i>Pembangkit Listrik Tenaga Air</i> |
| IAEA | : <i>International Atom and Energi Agency</i> |
| PSI | : <i>Proliferation Security Initiative</i> |
| SM | : <i>Sebelum Masehi</i> |
| M | : <i>Masehi</i> |
| DK | : <i>Dewan Keamanan</i> |
| PBB | : <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i> |
| HAM | : <i>Hak Asasi Manusia</i> |
| MW | : <i>Megawatt</i> |
| HEU | : <i>Highly Enriched Uranium</i> |
| SR | : <i>Skala Richter</i> |
| KCNA | : <i>Potassium Cyanide</i> |
| USGS | : <i>United States Geological Survey</i> |
| UNC | : <i>United Nations Command</i> |
| CFC | : <i>Combined Forces Command</i> |
| KORUS FTA | : <i>South Korea-U.S. Free Trade Agreement</i> |
| GDP | : <i>Gross Domestic Product</i> |
| ASEAN | : <i>Association of South East Asia Nations</i> |
| BM/C3I | : <i>Battle Management Command, Control, Communications, and Intelligence</i> |
| AESA | : <i>Active Electronically Scanned Array</i> |
| KV | : <i>Kliment Voroshilov</i> |
| KAMD | : <i>Korean Air Missile Defense</i> |
| UN | : <i>United Nation</i> |
| VBSS | : <i>Visit Board Search Seizure</i> |



| | |
|-------|---|
| WTO | : <i>World Trade Organization</i> |
| SRBM | : <i>Short Range Ballistic Missile</i> |
| MRBM | : <i>Medium Range Ballistic Missile</i> |
| SLBM | : <i>Submarine Launched Ballistic Missile</i> |
| IRBM | : <i>Intermediate Range Ballistic Missile</i> |
| ICBM | : <i>Intercontinental Ballistic Missile</i> |
| TNT | : <i>Trinitrotoluene</i> |
| kt | : <i>Kiloton</i> |
| mb | : <i>Body Wave Magnitude</i> |
| TV | : <i>Televisi</i> |
| DMZ | : <i>Demilitarized Zone</i> |
| ER | : <i>Extended Range</i> |
| WMD | : <i>Weapon of Mass Destruction</i> |
| MLRS | : <i>Multiple Launch Rocket System</i> |
| BMD | : <i>Ballistic Missile Defense</i> |
| MTCR | : <i>Missile Technology Control Regime</i> |
| PAC | : <i>Patriot Missile</i> |
| L-SAM | : <i>Long-range Surface-to-Air Missile</i> |
| USFK | : <i>United States Forces Korea</i> |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korea Selatan dan Amerika Serikat telah sepakat untuk bekerjasama membangun sistem pertahanan rudal, *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di wilayah Seongju, Provinsi Gyeongsang Utara, pada Jumat, tanggal 8 Juli 2016 (Yonhap, Ramadhan, dan Natalia, 2016). Kesepakatan ini mengizinkan Amerika Serikat untuk memasang sistem pertahanan rudal THAAD di wilayah Korea Selatan. Amerika Serikat berencana akan mengerahkan sistem pertahanan rudal tersebut selama delapan hingga sepuluh bulan kedepan. Hal ini menarik untuk diteliti karena kesepakatan ini menimbulkan beberapa kontroversi yang datang dari dalam dan luar negara. Beberapa negara seperti Rusia, Korea Utara dan Cina memprotes keras rencana Korea Selatan dan Amerika Serikat tersebut. Protes juga datang dari penduduk lokal yang dengan tegas menolak pemasangan sistem pertahanan rudal dekat lokasi pemasangan sistem pertahanan rudal tersebut. Sementara itu meskipun menimbulkan banyak protes, rencana ini tetap terealisasi dan mulai dilakukan pada 7 Maret 2017.

Kesepakatan pemasangan sistem pertahanan anti rudal THAAD antara Amerika Serikat dan Korea Selatan telah mengganggu hubungan diplomatik Korea Selatan dan Cina. Hal ini dikarenakan adanya kecurigaan terhadap Amerika Serikat yang akan menggunakan THAAD sebagai alat untuk melawan Cina. Ancaman sanksi ekonomi dijatuhkan kepada Korea Selatan karena memberikan lahannya untuk sistem pertahanan anti rudal milik Amerika Serikat itu, diantaranya seperti embargo perdagangan, pemblokiran industri Kpop, dsb (Hasugian, 2017). Akibatnya, Korea Selatan mengalami kerugian yang cukup besar karena Cina menyumbang cukup banyak pendapatan bagi ekonomi Korea Selatan.

Protes keras akan pengadaan sistem pertahanan rudal THAAD Amerika Serikat itu juga datang dari penduduk di lokasi sistem rudal tersebut. Masyarakat setempat khawatir akan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh sistem rudal tersebut. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2014 di mana Korea Selatan yang

saat itu menolak pengadaan sistem pertahanan rudal THAAD milik Amerika Serikat ini akibat ancaman pencemaran lingkungan. Sistem rudal THAAD ini dianalisis oleh Environmental Assessment – EA akan menimbulkan efek lingkungan dan radiasi elektromagnetik yang sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, kualitas udara dan sumber daya air juga akan menjadi tercemar dari bahan-bahan yang berbahaya. Dampak inilah yang masih menjadi pertimbangan dan kekhawatiran oleh masyarakat sekitar lokasi rudal.

Sistem pertahanan rudal THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) yang akan ditempatkan di Korea Selatan sendiri merupakan sistem pertahanan rudal yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik jarak pendek, sedang, dan menengah yang masuk ke wilayah teritorial. Sistem ini dirancang untuk melawan jenis senjata rudal Scud buatan Rusia yang juga serupa dengan yang dimiliki Korea Utara (IAPDForum, 2016). THAAD dikembangkan dan diproduksi oleh raksasa pertahanan Amerika Serikat, Lockheed Martin, untuk kebutuhan Angkatan Darat Amerika Serikat, yang setiap sistemnya terdiri dari lima komponen utama, yaitu: pencegat, peluncur, radar, unit kontrol, dan peralatan pendukung. Fungsi utama THAAD adalah sebagai perisai pertahanan udara berlapis untuk melindungi area-area taktis atau strategis, seperti fasilitas militer, lapangan udara, dan pusat populasi (Griffiths & Berlinger, 2016)

Penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan merupakan bentuk komitmen yang dilakukan Amerika Serikat sebagai “payung nuklir” Korea Selatan dalam menjamin pertahanan dan keamanan negaranya. Aliansi pertahanan dan keamanan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak terlepas dari sejarah Perang Korea yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945). Persaingan ideologi antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dengan ideologi Liberalisme dan Uni Soviet dengan ideologi komunisme, terjadi sejak saat itu. Periode dimana terjadi konflik dan persaingan kekuasaan ini dikenal dengan Perang Dingin (1945-1991). Perebutan pengaruh oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia, khususnya di Semenanjung Korea yang dianggap sebagai wilayah strategis (Aldikawati, 2015)

Isu reunifikasi yang melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan berubah

menjadi suatu konflik akibat keterlibatan Blok Barat dan Timur yang memiliki ideologi yang berbeda. Selanjutnya, Korea Utara yang mendapat dukungan penuh Uni Soviet akhirnya melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan pada 25 Juni 1950 untuk menguasai seluruh semenanjung Korea (KBS World Radio, 2016). Dewan Keamanan PBB mengirim bala tentara Amerika Serikat untuk membantu Korea Selatan membendung kekuatan Korea Utara dan sekutunya. Adanya senjata nuklir Amerika Serikat dalam perang justru membuat semakin memanasnya konflik tersebut sehingga menyebabkan terjadinya perang saudara di Korea Selatan selama tiga tahun yakni tahun 1950 hingga ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953.

Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan *Mutual Defense Treaty* (Perjanjian Pertahanan Bersama) setelah berakhirnya perang Korea pada tahun 1953. Perjanjian ini mengharuskan personel militer Amerika Serikat untuk terus menerus mempertahankan keberadaannya di Semenanjung Korea guna membantu Korea Selatan mempertahankan dirinya, terutama terhadap serangan dari Korea Utara. Hal ini dilakukan karena meskipun perang Korea telah berakhir tahun 1953, namun konflik antarnegara dan sekutunya masih sering terjadi hingga saat ini. Selain itu, penempatan pasukan yang dilakukan Amerika Serikat di Korea Selatan juga dimaksudkan untuk mencegah tersebarnya ideologi sosialis-komunis yang dibawa oleh Cina. Oleh karena itu, Korea Selatan menjadi mitra yang sangat penting bagi Amerika Serikat di Asia Timur.

Adanya kepentingan nasional untuk melindungi aliansi dari berbagai ancaman mendorong Amerika Serikat untuk bersikap protektif terhadap Korea Selatan. Hal ini terkait dengan program pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara yang sebenarnya telah dimulai pada tahun 1956 setelah ditandatanganinya sebuah perjanjian kerjasama penggunaan damai energi nuklir dengan Uni Soviet. Korea Utara melakukan upaya peningkatan nuklir pada tahun 1960-an dengan orientasi ofensif melalui pengembangan senjata nuklir. Di mana Korea Utara menggunakan senjata nuklir dapat menangkal serangan Amerika Serikat dan memperkecil ketergantungan Korea Utara terhadap Uni Soviet dan Cina (KBS World Radio, 2016).

Berdasarkan gambar yang diambil satelit Amerika Serikat pada tahun 1984 menunjukkan bahwa terdapat Pembangunan sebuah fasilitas nuklir baru yang berdaya 50 MW di Yongbyon oleh Korea Utara. Pembangunan nuklir tersebut menarik perhatian negara-negara di sekitarnya, termasuk Amerika Serikat karena di tempat yang sama, diketahui pula terdapat pabrik plutonium yang bisa digunakan sebagai bahan pengembangan senjata nuklir. Kekhawatiran negara-negara sekitar Korea Utara semakin meningkat ketika Korea Utara melakukan uji coba rudal Scud-B yang pertama pada bulan April 1984. Aksi provokatif yang dilakukan Korea Utara ini membuat Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung dengan NPT (*Non-Proliferation Treaty*) pada tanggal 12 Desember 1985 agar tidak menyebarkan nuklirnya (Wicahyani, 2010).

Korea Utara berusaha untuk menjamin keamanannya sendiri pasca Perang Dingin karena tidak adanya lagi jaminan keamanan dari Uni Soviet. Kemudian, Korea Utara dan Korea Selatan melakukan perjanjian Joint Declaration of Denuclearization of the Korean Peninsula pada 19 Februari 1991. Di mana perjanjian tersebut mengatur kedua negara untuk tidak melakukan uji coba, membuat, memproduksi, menerima, memiliki, menyimpan, menempatkan atau menggunakan senjata nuklir. Akan tetapi kesepakatan ini tidak berjalan dengan semestinya karena Korea Utara diketahui tidak mendeklarasikan jumlah material nuklirnya secara benar. Ancaman sanksi dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan akan dijatuhkan jika Korea Utara bersikeras untuk memproduksi plutonium. Hal ini ditafsirkan Korea Utara sebagai pernyataan perang, sehingga mengancam akan membunuh atau menghancurkan Korea Selatan. Peristiwa ini mengawali terjadinya krisis nuklir pertama Semenanjung Korea (Wicahyani, 2010).

Ketegangan akibat krisis nuklir pertama yang terjadi di Semenanjung Korea mendorong Amerika Serikat untuk menambah pasukannya yang ditempatkan di Korea Selatan. Di samping itu, upaya diplomatik juga dilakukan Amerika Serikat bersama Korea Selatan untuk mengakhiri krisis nuklir ini dan menghasilkan Kesepakatan Jenewa (*Agreed Framework*) pada tahun 1994 mengenai penghentian program nuklir Korea Utara diikuti dengan pembongkaran fasilitas di Yongbyon. Sebagai gantinya, Jepang dan Korea Selatan bersedia untuk

membangun reaktor air ringan kapasitas 2000 MW sedangkan Amerika Serikat menyediakan 500.000 ton minyak solar setiap tahun untuk pemanasan dan pembangkit listrik hingga konstruksi PLTA selesai dibangun (Wicahyani, 2010). Akan tetapi, setelah berakhirnya kesepakatan pada tahun 2002, Korea Utara kembali melakukan peningkatan penyimpanan plutonium dan upaya uji coba nuklir. Kemajuan program nuklir ini memicu berbagai reaksi seluruh dunia sehingga menyebabkan terjadinya krisis nuklir Korea Utara yang kedua.

George W. Bush, Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa Korea Utara merupakan “*an axis of evil*” (poros kejahatan) melalui pidatonya pada 29 Januari 2002. Pernyataan tersebut berarti bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan adanya ikatan diplomatik dengan Korea Utara. Hal ini dibuktikan Amerika Serikat dengan menghentikan pengiriman bahan bakar minyak solar ke Korea Utara dan juga menghimbau Korea Selatan dan Jepang untuk menghentikan pengerjaan reaktor. Korea Utara kemudian merespon tindakan Amerika Serikat tersebut dengan menolak kehadiran inspektur *International Atom and Energi Agency* (IAEA) sebagai pengawas nuklir dalam perjanjian NPT, dan membuka kembali reaktornya sekaligus mengumumkan akan memproses bahan bakar kembali (Wicahyani, 2010).

Ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea membawa Korea Utara akhirnya keluar dari perjanjian *Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada awal tahun 2003. Keluarnya Korea Utara dari NPT dikhawatirkan akan berdampak pada pengembangan nuklir Korea Utara yang tak terkontrol. Hal ini kemudian mendorong terjadinya perundingan enam pihak (*Six Party Talks*) yang diusulkan Amerika Serikat pada bulan Agustus 2003 di Beijing. Perundingan enam pihak (*Six Party Talks*) ini melibatkan Cina, Jepang, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat (Berlianto, 2016). Perundingan enam pihak nyatanya tidak dapat menghentikan program nuklir Korea Utara. Korea Utara diyakini telah memiliki bahan bakar yang dapat membuat delapan hingga sepuluh bom nuklir pada tahun 2005. Situasi semakin rumit setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal secara terus menerus, yakni pada tanggal 4 Juli dan 9 Oktober tahun 2006 sehingga DK PBB menjatuhkan sanksi berupa pembekuan finansial dan senjata

(Wicahyani, 2010).

Perundingan enam pihak (*Six Party Talks*) terus dilakukan hingga tahun 2008 demi mendapatkan kesepakatan yang diinginkan. Akan tetapi, perundingan ini tetap gagal dalam menghentikan pengembangan nuklir Korea Utara. Ini terbukti dengan peluncuran roket jarak jauh Korea Utara, berturut-turut pada tanggal 4 April dan 25 Mei 2009 yang diklaim Korea Utara sebagai satelit komunikasi (Kemampuan misil | Etalase Tentang Korea Utara | KBS WORLD Radio, 2016). Korea Selatan sebagai negara terdekat Korea Utara, semakin merasa khawatir akan peningkatan aktivitas nuklir negara tetangganya itu. Untuk itu, Korea Selatan berupaya untuk melakukan perimbangan kekuatan militer dengan mempererat aliansinya bersama Amerika Serikat.

Amerika Serikat dan Korea Selatan kemudian melakukan kesepakatan *Proliferation Security Initiative* (PSI) pada tahun 2009 yang bertujuan untuk menghentikan penyelundupan senjata pemusnah massal di seluruh negara di dunia yang sekaligus menahan gejolak keamanan di Semenanjung Korea. Selain Korea Selatan dan Amerika Serikat, perjanjian ini juga beranggotakan 10 negara lainnya, yaitu Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Inggris, Australia, dan Jepang. Setelah perjanjian tersebut, aliansi militer yang dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat terus mengalami peningkatan yang berujung pada kesepakatan penempatan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di Korea Selatan.

Keengganan Korea Utara untuk melakukan dialog antar-Korea kemudian membuat Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan untuk tidak melanjutkan dialog enam pihak atau pun membuat dialog bilateral antar-Korea maupun Korea Utara-Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan Korea Utara untuk segera ke meja perundingan dengan Korea Selatan dan mendorong Korea Utara untuk bersungguh-sungguh dalam menunjukkan komitmennya atas perlucutan senjata nuklir (KBS World Radio, 2011). Harapan untuk membuat Korea Utara bersikap kooperatif terkait isu pengembangan nuklir negaranya tidak berjalan baik. Korea Utara yang saat itu dipimpin Kim Jong Un, kembali aktif dalam melakukan uji coba nuklirnya, pada tahun 2012 dan tahun

2013. Korea Utara diketahui telah meluncurkan roket jarak jauhnya yang semakin canggih yang kemudian diklaim masyarakat internasional sebagai rudal balistik yang disamakan (Berlianto, 2016).

Korea Selatan menilai bahwa uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara semakin mengkhawatirkan. Selain karena rudal balistik dikenal sebagai hulu ledak nuklir yang mampu melewati benua-benua, tetapi juga adanya keyakinan dari pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara bahwa pemerintahan Kim Jong Un itu telah memiliki 40 kilogram plutonium yang dapat dibuat menjadi delapan senjata nuklir. Sementara itu, Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye, menyatakan bahwa dirinya memiliki keyakinan pada militer dan mempertahankan kesiapan tempur terhadap provokasi Korea Utara (Muhaimin, 2015).

Latihan gabungan yang selama ini dipilih Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai respon atas peningkatan nuklir Korea Utara nyatanya justru semakin menimbulkan ketegangan di Semenanjung Korea. Bahkan ancaman Korea Utara untuk menyerang Amerika Serikat dengan rudalnya semakin kencang. Temuan aktivitas penggalian terowongan baru di lokasi uji utama nuklir di Punggye-ri oleh citra satelit Amerika Serikat dibenarkan dengan munculnya pernyataan Kim Jong-un di media pemerintah pada 11 Desember 2015. Di mana ia mengatakan bahwa negaranya telah mengembangkan bom hidrogen (Berlianto, 2016). Pernyataan Kim Jong Un tersebut akhirnya dibuktikan dengan uji coba nuklir keempat pada bulan Januari 2016 yang diikuti dengan serangkaian peluncuran yang diduga sebagai senjata balistik antar-benua pada 7 Februari 2016.

Masyarakat internasional dan semua negara di dunia, khususnya Amerika Serikat dan Korea Selatan mengecam atas uji coba nuklir keempat yang dilakukan Korea Utara. Berbagai kecaman yang datang dari masyarakat internasional tidak dapat menghentikan Pyongyang untuk melanjutkan proyek peluncuran rudalnya. Hal ini mendorong Korea Selatan untuk melakukan peningkatan perlindungan terhadap keamanan dan pertahanan negaranya, termasuk menjalin aliansi bersama Amerika Serikat demi melindungi wilayah negaranya.

Kebijakan luar negeri yang diambil Korea Selatan terkait penerimaan

sistem pertahanan rudal Amerika Serikat merupakan langkah yang cukup berani. Hal ini terkait dengan konsekuensi yang akan diterima Korea Selatan apabila menerima sistem pertahanan rudal THAAD tersebut, yang tidak hanya buruk bagi kelestarian lingkungan namun juga dapat mengiritasi hubungannya dengan Cina serta mempengaruhi kestabilan kawasan Semenanjung Korea. Selain itu, protes besar yang diterima oleh pemerintah Korea Selatan dari masyarakat setempat menambah daftar panjang kontroversi keputusan Park Geun Hye ini. Selain khawatir akan berdampak buruk pada lingkungan, masyarakat Korea Selatan juga khawatir akan semakin jauhnya impian reunifikasi dengan Korea Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan berusaha menjelaskan alasan Korea Selatan memasang sistem pertahanan rudal THAAD Amerika Serikat walaupun terdapat dampak buruk dari sistem pertahanan rudal tersebut bagi Korea Selatan..

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam suatu karya tulis ilmiah, ruang lingkup suatu pembahasan sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari ketidakfokusan penulis dalam membahas masalah yang diangkat sehingga tidak mengurangi bobot dari karya ilmiah. Selain itu, penulis akan dengan lebih mudah mengkaji peristiwa-peristiwa dalam kurun waktu tertentu dan menentukan teori dan konsep untuk fenomena yang diteliti.

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi merupakan ruang lingkup pembahasan suatu peristiwa atau objek yang sedang dikaji. Batasan materi berguna untuk membatasi pembahasan yang akan ditulis dalam suatu karya tulis ilmiah sehingga dapat memberikan ruang agar fokus pembahasan tidak meluas ke pembahasan lainnya. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis akan memfokuskan bahasan pada alasan yang menjadi pertimbangan Korea Selatan memasang sistem pertahanan rudal Amerika Serikat.

Akan tetapi penulis tidak akan membahas secara teknis mengenai strategi dan perhitungan militer terkait dengan alasan pemasangan rudal tersebut.

1.2.2 Batasan Waktu

Tulisan karya ilmiah ini menggunakan batasan waktu yang dimulai dari bulan Juni tahun 2014 hingga bulan Maret 2017. Pemilihan waktu, yaitu bulan Juni tahun 2014 sebagai batas awal dimulainya penelitian dikarenakan waktu tersebut merupakan awal Amerika Serikat secara resmi menyampaikan niatnya untuk menempatkan sistem pertahanan rudal balistik di Korea Selatan. Sedangkan untuk pemilihan waktu bulan Maret tahun 2017 sebagai batas akhir penelitian dikarenakan waktu tersebut merupakan awal pemasangan sistem pertahanan rudal THAAD Amerika Serikat.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang nantinya akan menjalani proses penelitian untuk menemukan jawabannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis melihat bahwa sikap Korea Selatan yang menerima sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat menimbulkan suatu pertanyaan terkait alasan penerimaan sistem pertahanan rudal THAAD yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Semenanjung Korea. Pertanyaan tersebut menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

“Mengapa Korea Selatan memasang sistem pertahanan rudal THAAD Amerika Serikat?”

1.4 Tujuan Penelitian

Seperti halnya suatu usaha dan kegiatan yang memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, sebuah penelitian karya ilmiah pun juga demikian. Tujuan penelitian harus ditentukan dengan jelas agar pembaca mengetahui apa yang ingin dicapai penulis dengan penelitiannya. Oleh sebab itu, tujuan peneliti dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui alasan apa yang membuat Korea Selatan memasang sistem pertahanan rudal Amerika Serikat.

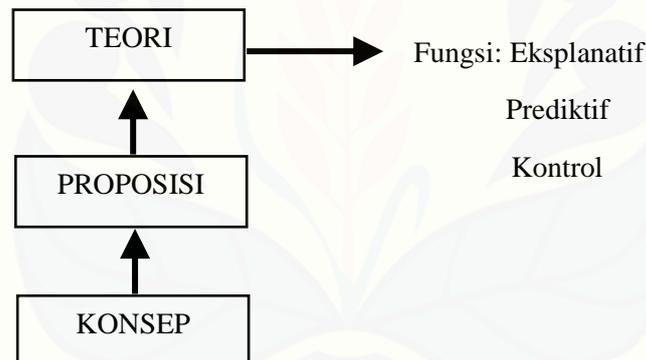
1.5 Kerangka Konseptual

Suatu penelitian tidak dapat lepas dari bangunan teori karena hakikat teori adalah untuk menjelaskan atau memprediksikan sebuah gejala. Jadi, dalam sebuah penelitian, teori harus digunakan untuk menjelaskan temuan yang didapat dan meramalkan apa yang akan terjadi setelah temuan itu didapat (Djiwandono, 2015).

Teori menurut Nan Lin adalah:

“A set of interrelated propositions, some of which can be empirically test” (Gulo, 2002).

Seperangkat proporsi yang dimaksud Nan Lin adalah pernyataan-pernyataan tentang hubungan diantara dua konsep atau lebih. Di mana konsep merupakan istilah yang merujuk pada suatu pengertian tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hubungan ketiganya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan antara teori, proposisi, dan konsep (Sumber: Gulo, 2002)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian teori dan konsep perlu diperhatikan agar dapat menjelaskan permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep *security dillema* dan aliansi militer.

Penulis menggunakan paradigma realis untuk menjelaskan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Di mana paradigma dapat diartikan sebagai suatu aliran pemikiran yang mempunyai asumsi yang sama mengenai bidang studi, seperti persetujuan tentang kerangka konseptual, petunjuk yang metodologis dan teknis analisis (Mas'ood, 1990). Menurut paradigma realis, peningkatan kekuatan

militer merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam sistem internasional yang anarki. Hal ini dilakukan demi memenuhi tujuan Negara, yaitu untuk lebih mempertahankan diri dan melindungi kepentingan nasionalnya daripada hanya mempertahankan suatu perdamaian.

Negara dan tindakannya tidak dibatasi oleh suatu institusi internasional yang mengakibatkan setiap negara mempunyai kebebasan untuk mengambil tindakan tanpa paksaan dari pihak manapun. Situasi ini memaksa setiap negara untuk dapat mempertahankan diri dari ancaman ataupun serangan dari negara lain serta mementingkan kepentingan negaranya (kepentingan nasional) di atas kepentingan negara lain.

Upaya yang biasanya digunakan dalam melindungi diri dari ancaman negara lain adalah dengan meningkatkan kekuatan militer, membentuk suatu aliansi militer, melakukan hubungan kerjasama dan langkah-langkah lainnya. Hal ini akan berdampak pada munculnya suatu lingkaran yang menimbulkan potensi konflik, di mana upaya tersebut dianggap sebagai ancaman oleh negara lain. Gejala ini kemudian disebut dengan *security dilemma* (dilema keamanan) dalam hubungan antarnegara di dunia. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan konsep *security dilemma* (dilema keamanan) dan konsep aliansi militer.

1.5.1 Konsep *Security Dilemma* (Dilema Keamanan)

Konsep dilema keamanan menjelaskan bahwa setiap upaya yang dilakukan suatu negara demi menciptakan rasa aman melalui peningkatan kapabilitas justru menimbulkan rasa tidak aman atau menjadi ancaman bagi negara lain. Situasi ini selanjutnya akan mendorong negara lain itu melakukan hal yang sama, yaitu peningkatan kapabilitas. Upaya negara kedua akan memberikan dampak pada meningkatnya rasa terancam bagi negara pertama dan akhirnya berujung pada pecahnya perang (Wardoyo, 2015).

Dilema keamanan dapat melihat bahwa kemanapun kebijakan ditujukan oleh sebuah negara untuk mendapatkan jaminan keamanan menjadi suatu hal yang tidak memuaskan. Ketidakpuasan atas suatu pencapaian, membuat kebijakan suatu negara gagal menyadari fokus keamanan negara atau menciptakan fokus

baru. Hal ini menjadikan negara masih merasa tidak aman. Negara berada dalam sebuah paradoks, di mana dengan berbagai solusi dilema keamanan yang negara pilih tidak dapat memuaskan dan tidak menjadi solusi sama sekali. Hasil dari dilema keamanan adalah keamanan tidak dapat dicapai. Sebuah dilema keamanan dapat melihat secara sederhana mengenai berbagai situasi yang sedang dihadapi pemerintah, yakni pada persoalan yang mempengaruhi keamanan mereka. Situasi ini menyebabkan pemerintah dihadapkan dengan sebuah pilihan diantara dua alternatif yang sama dan tidak diinginkan (Davis, 1996).

Menurut M. Jane Davis, situasi dikatakan sedang menghadapi dilema keamanan ketika memenuhi beberapa kriteria, yaitu (Davis, 1996):

1. mengurangi keamanan pihak lain,
2. mengurangi keamanan semua pihak,
3. ketidakpastian tujuan,
4. tidak adanya kebijakan yang cocok.

Hence Charles Glaser menjelaskan dilema keamanan seperti yang terjadi pada Amerika Serikat saat menghadapi Uni Soviet (Davis, 1996). Di mana Amerika Serikat menghadapi sebuah dilema keamanan ketika dirinya tidak dapat meningkatkan keamanannya tanpa mengurangi keamanan Uni Soviet. Amerika Serikat perlu meningkatkan kekuatan militernya demi melindungi dirinya, yang kemudian hal ini menciptakan rasa tidak aman (mengancam) negara lain yang perlu melindungi negaranya juga. Dalam situasi tersebut, negara yang mencari keamanan tidak dapat menghindari terjadinya kapabilitas militer yang saling mengancam. Apa yang dilakukan Amerika Serikat demi meningkatkan keamanannya secara tidak langsung telah mempengaruhi pada penurunan kewanan Uni Soviet dan negara-negara lain. Situasi yang selanjutnya terjadi adalah adanya sejumlah negara yang berkuasa yang saling memenuhi perlindungan mereka sendiri (dengan meningkatkan kapabilitas) yang menyebabkan terciptanya kondisi *insecurity* bagi semua pihak. Munculnya ambiguitas tujuan dalam pikiran pihak lain mengenai tindakan Amerika Serikat menyebabkan tidak adanya kebijakan yang cocok untuk merespon tindakan tersebut.

Untuk merespon suatu peningkatan kekuatan suatu negara, maka Negara kedua juga seharusnya berupaya untuk mempertahankan dirinya dari serangan Negara lain dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan Negara lain yang berdasarkan prinsip *self help* (pertolongan terhadap diri sendiri). Oleh karena itu, wajar jika dalam menjaga dan meningkatkan keamanannya, suatu Negara mengupayakan berbagai cara yang dapat mengakibatkan berkurangnya keamanan serta dapat mengganggu keamanan Negara lain. Negara-negara yang terancam keamanannya tersebut tentunya akan mengambil tindakan untuk menjaga keamanannya yang kemudian dapat mengancam balik keamanan Negara pertama.

Pada kasus Korea Selatan dan Korea Utara, semua kriteria yang menunjukkan kondisi terjadinya dilema keamanan telah terpenuhi. Ketika Korea Utara melakukan peningkatan kapabilitas militernya secara terus menerus, ditandai dengan uji coba senjata nuklir yang intens sekaligus mengalami peningkatan daya ledak, membuat Korea Selatan menghadapi sebuah dilema keamanan.

Peningkatan kekuatan rudal Korea Utara yang bertujuan untuk melindungi dirinya secara tidak langsung telah menurunkan keamanan Korea Selatan. Kondisi ini mendorong Korea Selatan mencari kekuatan dan keamanan bagi dirinya untuk menghadapi peningkatan kekuatan rudal Korea Utara yang dianggapnya sebagai ancaman. Dampak selanjutnya dari kondisi tersebut adalah adanya sejumlah negara-negara yang berkuasa, seperti Amerika Serikat dan Cina, yang masing-masing mengadakan defens mereka sendiri, dan berakibat pada terciptanya kondisi *insecurity* bagi semua negara.

Keberadaan dilema keamanan dikarenakan pengaturan militer dari suatu negara menciptakan ambiguitas dalam pikiran negara lain, apakah mereka melakukan hal ini hanya untuk tujuan defens atau untuk tujuan ofensif. Anggapan negara lain mengenai suatu tindakan atau kebijakan yang diterapkan dari sebuah negara menjadi sangat penting dalam menentukan respon negara lain. Ini terjadi pada aktivitas pengembangan nuklir Korea Utara yang memunculkan ketidakpastian akan tujuan dari tindakan tersebut dalam pikiran Korea Selatan.

Meskipun terdapat klaim tentang tujuan dari aktivitas tersebut hanya untuk perlindungan diri (defensif), namun kebutuhan akan rasa aman memaksa Korea Selatan perlu meningkatkan keamanan negaranya.

Dilema keamanan juga menghadapi sebuah fakta bahwa tidak adanya kebijakan yang cocok untuk diterapkan. Hal ini terjadi karena jika sebuah negara memutuskan untuk meningkatkan keamanan negaranya untuk melindungi diri dari ancaman, maka negara tersebut tidak akan aman (*insecure*), begitu juga ketidakamanan akan terjadi jika dirinya tidak melakukan apa pun. Hal ini serupa dengan pernyataan Richard Smoke bahwa:

“Gagasan "dilema keamanan" pada dasarnya menyatakan bahwa satu bangsa akan merasa tidak aman jika tidak berusaha melindungi keamanannya, tetapi upaya apa pun untuk melakukannya harus mengancam keamanan satu atau lebih negara ... Dengan demikian negara pertama menghadapi dilema: itu akan menjadi tidak aman jika tidak bertindak dan tidak aman jika hal itu terjadi” (Davis, 1996).

Aktivitas pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara mendorong Korea Selatan memutuskan kebijakan atau tindakan untuk melindungi dirinya. Hal ini membuat dilema keamanan pada Korea Selatan di mana ketika Korea Selatan memutuskan untuk meningkatkan keamanannya maka hal itu akan membuat negaranya sendiri tidak aman, namun jika Korea Selatan memilih untuk diam, maka dirinya pun tidak akan aman.

1.5.2 Konsep Aliansi Militer

Konsep aliansi dalam hubungan internasional merupakan suatu perjanjian formal antara dua negara atau lebih untuk saling mendukung, baik dalam hal keamanan, maupun meningkatkan kemampuan dalam melawan negara tertentu. Aliansi kontemporer menyediakan aksi gabungan dari dua negara berdaulat atau lebih dan secara umum bersifat defensif, mewajibkan sekutu untuk bergabung jika masing-masing dari mereka diserang oleh negara atau koalisi lain. Suatu aliansi yang mungkin bersifat informal, biasanya diformalkan oleh sebuah perjanjian aliansi. Klausul yang paling penting adalah yang menentukan casus foederis, atau keadaan di mana perjanjian tersebut mengharuskan sekutu untuk membantu

sesama anggota.

Konsep realis menjelaskan bahwa negara merupakan aktor sentral politik dan aksi negara diatur oleh persepsi kedaulatan, kepentingan nasional, dan keamanan. Realisme sangat berkaitan dengan perlindungan dan kelangsungan hidup negara sebagai aktor diskrit. Aliansi secara realis muncul ketika masing-masing negara memiliki perasaan tidak aman terhadap ancaman dari negara lain. Aliansi menjadi suatu bentuk penyelesaian guna membentuk kekuatan bersama untuk membendung ancaman dan mempertahankan diri diantara beberapa negara.

Berdasarkan pandangan realis, negara akan selalu memandang negara lain sebagai sumber ancaman yang paling utama dalam sistem internasional yang anarki. Bertahan hidup *survive* merupakan kepentingan utama negara sehingga peningkatan kapabilitas sangat diperlukan. Aliansi menjadi suatu cara bagi negara untuk mencegah adanya hegemoni dalam suatu sistem internasional. Selain itu, kesamaan ancaman terhadap eksistensi negara mendorong aliansi terbentuk sebagai pertahanan terhadap ancaman eksternal. Prinsip *one for all* dan *all for one* menjadi prinsip dalam membangun aliansi untuk menghadapi ancaman bersama (Wardoyo, 2015). Aliansi dalam suatu sistem yang terdiri atas sejumlah negara berukuran sedang, seperti di Eropa sejak Abad Pertengahan, dilakukan demi mencegah satu pun negara untuk membangun hegemoni yang kekal atas semua yang lain. Hal ini terjadi karena negara-negara lain bergabung bersama dalam aliansi untuk menentang kekuatan tunggal tersebut. Misalnya aliansi pada abad ke-19 antara Austria dan Jerman, yang digunakan untuk bersama-sama melawan Perancis dan Rusia, di mana Perancis adalah musuh Jerman dan Rusia adalah musuh Austria.

Menurut Edwin H. Fedder (1968: 67), aliansi secara tradisional dibangun untuk melakukan satu atau lebih dari fungsi-fungsi berikut:

1. *Augmentive* yaitu bentuk aliansi di mana aliansi yang dilakukan negara satu dengan negara kedua dimaksudkan untuk menambah kekuatan negara kedua untuk menghadapi kekuatan lawan bersama-sama. Aliansi ini akan menggabungkan kekuatan anggota, dengan kata lain negara satu *plus* negara kedua untuk mengungguli atau setidaknya sama dengan kekuatan lawan.

2. *Pre-emptive* yaitu bentuk aliansi di mana aliansi yang dilakukan negara satu dengan negara kedua dimaksudkan untuk memisahkan negara kedua dari kubu lawan, sehingga akan mengurangi kekuatan pihak lawan.
3. *Strategic* yaitu bentuk aliansi di mana aliansi yang dilakukan negara satu dengan negara kedua dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan wilayah serta sarana yang dimiliki negara kedua demi tujuan strateginya, seperti pangkalan militer, pemanfaatan tenaga ahli, dan lain sebagainya.

Konsep aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dapat menggambarkan semua fungsi aliansi di atas. Aliansi yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai negara satu dan Korea Selatan sebagai negara dua mencakup semua fungsi dan tujuan dari tiga bentuk aliansi yang ada. Korea Utara menjadi suatu ancaman bagi Korea Selatan mengingat invasi yang pernah dilakukan Pyongyang terhadap Seoul. Sebagaimana fungsi aliansi *Augmentive*, Amerika Serikat beraliansi dengan Korea Selatan untuk menambahkan kekuatan Korea Selatan guna menghadapi kekuatan Korea Utara bersama-sama. Penggabungan kekuatan keduanya akan membuat kekuatan Korea Selatan dan Amerika Serikat lebih unggul dibandingkan kekuatan Korea Utara. Bagi Amerika Serikat, keberadaan Korea Utara yang memiliki ideologi komunis merupakan suatu ancaman bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Untuk itu, Amerika Serikat melakukan aliansi dengan Korea Selatan guna untuk memisahkan Korea Selatan dari pengaruh ideologi komunis Korea Utara mengingat kedua negara ini pernah menjadi satu negara. Fungsi dan tujuan ini menunjukkan fungsi aliansi *pre-emptive*. Selain kedua fungsi tersebut, fungsi *strategic* juga berlaku dalam aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan di mana Amerika Serikat memanfaatkan wilayah Korea Selatan demi tujuan strateginya. Misalnya, Amerika Serikat membentuk pangkalan militer di Korea Selatan guna membantu Korea Selatan melindungi wilayahnya dan menjaga *status quo* di Asia Timur.

Pemasangan sistem THAAD Amerika Serikat di Korea Selatan merupakan penerapan fungsi aliansi *Augmentive* di mana aliansi yang dilakukan Amerika Serikat dengan Korea Selatan dimaksudkan untuk menambah kekuatan negara Korea Selatan untuk menghadapi kekuatan Korea Utara bersama-sama.

Penggabungan kekuatan dari dua negara akan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan kekuatan tunggal. Hal ini tentu akan membuat kekuatan militer Korea Selatan jauh lebih meningkat dan terjamin dalam menghadapi ancaman Korea Utara.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama cukup penting mengingat hal tersebut merupakan bagian dari hasil pemikiran sementara penulis terhadap topik yang sedang diambil. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka argumen utama penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Alasan yang membuat Korea Selatan memasang sistem pertahanan rudal Amerika Serikat adalah karena dilema keamanan yang terjadi di Semenanjung Korea dan adanya aliansi militer dengan Amerika Serikat..

1.7 Metodologi Penelitian

Kata ‘Metode’ dan ‘Metodologi’ memiliki pengertian yang berbeda. Metodologi merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh dan gagasan teoritis suatu penelitian, sedangkan Metode merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara, dan observasi. Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu (Semiawan, 2010).

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang berasal dari berbagai literatur dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan merupakan data yang tidak didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Untuk mengumpulkan data-data sekunder, penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yang dinilai relevan untuk melakukan studi kepustakaan, yakni diantaranya :

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP Universitas Jember

Literatur yang penulis dapatkan berasal dari :

1. Media Cetak
2. Situs Internet
3. Buku
4. Jurnal dan buku elektronik (*e-book*)

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam suatu karya tulis ilmiah, suatu analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisa, maka suatu data akan dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 1983). Menurut The Liang Gie, analisis data adalah:

“Sege nap rangkaian pembuatan pikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam, terutama untuk mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan unuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu sama lain dan perannya dalam keseluruhan yang bulat” (Nazir, 1983).

Penulis menggunakan cara berfikir deduktif dalam menganalisis fenomena yang diangkat agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Di mana dalam menjelaskan suatu fenomena diawali dengan suatu kesimpulan umum dan diakhiri dengan suatu yang khusus.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam karya ilmiah ini akan dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi mengenai latar belakang munculnya permasalahan, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2. KONSTELASI POLITIK LUAR NEGERI DAN KEAMANAN KOREA SELATAN DI KAWASAN ASIA TIMUR

Bab ini akan membahas mengenai keadaan politik dalam dan luar negeri

serta keamanan Korea Selatan di kawasan Asia Timur, mulai dari profil negara, gambaran politik dalam dan luar negeri, hingga situasi keamanan Korea Selatan.

BAB 3. ALIANSI MILITER DAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN

Bab ini akan membahas mengenai aliansi militer dan keamanan Amerika Serikat dan Korea Selatan, mulai dari awal mula aliansi terbentuk hingga hubungan kedua negara saat ini. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi kedua negara dalam membangun hubungan bilateral.

BAB 4. INSTALASI SISTEM PERTAHANAN RUDAL *TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE* (THAAD) AMERIKA SERIKAT DI KOREA SELATAN

Bab ini akan membahas mengenai alasan yang membuat Korea Selatan menerima sistem pertahanan rudal Amerika Serikat yang berarti akan menjawab rumusan masalah yang telah disusun dalam Bab I.

BAB 5. KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan mengenai alasan Korea Selatan menerima sistem pertahanan rudal Amerika Serikat.

BAB 2. KONSTELASI POLITIK LUAR NEGERI DAN KEAMANAN KOREA SELATAN DI SEMENANJUNG KOREA

Bab ini akan membahas mengenai keadaan politik dalam dan luar negeri serta keamanan Korea Selatan di Semenanjung Korea, mulai dari profil negara, gambaran politik dalam dan luar negeri, hingga situasi keamanan Korea Selatan. Hal ini perlu dijelaskan karena berkaitan dengan keputusan Korea Selatan untuk memasang sistem pertahanan rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) Amerika Serikat di wilayahnya. Sistem pertahanan rudal THAAD pada dasarnya digunakan untuk melindungi keamanan wilayah Korea Selatan sehingga perlu dijelaskan keadaan politik dan keamanan negara Korea Selatan saat itu. Bab ini juga akan menjelaskan ancaman yang dirasakan Korea Selatan yang akhirnya mendorong adanya keputusan untuk memasang sistem pertahanan rudal THAAD.

Korea Selatan merupakan negara di Asia Timur yang berada di selatan Semenanjung Korea dengan ibu kota yakni Seoul. Korea Selatan berbatasan langsung dengan Korea Utara di mana keduanya pernah menjadi sebuah negara hingga tahun 1948. Nama resmi Korea Selatan adalah Republik Korea Selatan (ROK). Luas wilayah Korea Selatan adalah sebesar 99.720 km² dengan populasi sekitar 51.181.299 jiwa pada tahun 2017 dengan mayoritas penduduknya tidak beragama (ateis) sebesar 56,9% (CIA, 2018).

Sejarah Korea dimulai dari pembentukan Semenanjung Korea menjadi satu pemerintahan oleh Dinasti Goryeo pada abad ke-10 dan membentuk Kekaisaran Besar Han pada abad ke-7. Setelah Perang Rusia-Jepang, Korea diduduki oleh Jepang mulai tahun 1905. Tokyo secara resmi mencaplok seluruh wilayah Semenanjung Korea pada tahun 1910. Korea memperoleh kembali kemerdekaannya setelah Jepang menyerah kepada Amerika Serikat pada tahun 1945. Akan tetapi, Korea akhirnya dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan akibat liberalisasi dan pendudukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Keberadaan Amerika Serikat di Korea Selatan membuat negara ini menjadi negara republik demokratis dengan kepala pemerintahannya adalah Presiden yang

dibantu oleh Perdana Menteri (CIA, 2018).

Korea Selatan di awal kemerdekaannya mengalami ketidakstabilan dalam politik maupun ekonominya sebelum akhirnya berubah menjadi Korea Selatan seperti saat ini. Peralihan dari pemerintahan yang otoriter menjadi demokrasi terjadi di Korea Selatan pada tahun 1987. Perspektif Korea Selatan terhadap Korea Utara menjadi faktor besar dalam politik Korea Selatan setelah merdeka pada tahun 1948. Persaingan dengan komunis Korea Utara sering kali digunakan para pemimpin otoriter selama Perang Dingin sebagai alat untuk melemahkan oposisi terhadap pemerintahan mereka. Isu reunifikasi semakin kuat akibat semakin meluasnya nasionalisme Korea pasca Perang Dingin, terutama selama masa pemerintahan Kim Dae-Jung dan Roh Moo-Hyun. Sedangkan di bawah pemerintahan Park Chung-Hee yang otoriter, Korea Selatan mengalami perkembangan ekonomi yang pesat antara tahun 1962 dan 1979.

Rezim otoriter Korea Selatan segera diakhiri dengan munculnya gerakan massa mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang menginginkan demokrasi di Korea Selatan. Akibatnya, Korea Selatan akhirnya berubah menjadi negara demokrasi yang ditandai dengan dilakukannya sistem pemilihan presiden langsung pada tahun 1987. Perkembangan politik Korea Selatan semakin baik atas dukungan dari Amerika Serikat, terutama dalam masalah keamanan nasional, pembangunan negara, dan demokratisasi. Dominasi Amerika Serikat dalam kebijakan internal dan eksternal Korea Selatan membawa kesuksesan besar terhadap posisi Korea Selatan di Asia Timur. Hal ini membuat hampir setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan akan selalu sejalan dengan Amerika Serikat.

2.1 Posisi Tawar (*bargaining position*) Korea Selatan di Asia Timur

Perdamaian di Semenanjung Korea sepertinya belum dapat terjadi karena adanya persaingan ideologi dan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di Korea pasca berakhirnya Perang Dunia II. Persaingan tersebut secara tidak langsung menyebabkan terjadinya perang Korea pada tahun 1950. Penandatanganan gencatan senjata antara Korea Utara dan Amerika Serikat pada

tahun 1953 mengakhiri perang ini, namun perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan sejatinya tidak terjadi hingga saat ini.

Pengaruh ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berbeda menyebabkan Semenanjung Korea tidak dapat bersatu kembali hingga saat ini. Keduanya kemudian menjadi negara merdeka dengan ideologi berbeda, yaitu Korea Selatan dengan ideologi demokrasi dan Korea Utara dengan ideologi Komunis. Impian reunifikasi semakin jauh untuk terealisasi akibat konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Hal ini menyebabkan keamanan kawasan Asia Timur dilanda ketidakpastian. Meskipun konflik yang terjadi hanya melibatkan dua negara, akan tetapi konflik ini dapat berpotensi meluas sehingga akan sangat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Timur, seperti isu pengembangan nuklir Korea Utara.

Kesepakatan pasca Perang Korea antara Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan bentuk komitmen Amerika Serikat sebagai payung nuklir Korea Selatan. Kehadiran tentara militer Amerika Serikat di kawasan Asia Timur kemudian menjadi faktor utama bagi stabilitas dan keamanan kawasan. Kondisi ini menggambarkan kawasan Asia Timur yang riskan akan konflik. Untuk itu, setiap negara didorong untuk menentukan kebijakan luar negeri yang cocok untuk melindungi keamanan wilayahnya. Selanjutnya, kebijakan yang diambil akan mempengaruhi kekuatan dan posisi tawar (*bargaining position*) negara tersebut di kawasan. Hal ini juga berlaku bagi Korea Selatan di Semenanjung Korea.

2.1.1 Korea Selatan di Bawah Pemerintahan Otoriter (1948 – 1987)

Politik pemerintahan Korea Selatan mengalami ketidakstabilan di awal kemerdekaannya yang lebih banyak dijalankan dengan pemerintahan otoriter. Kondisi dalam negeri yang belum stabil berpengaruh pada besarnya kebutuhan akan kekuatan militer untuk menertibkan kondisi dalam negeri dan mempertahankan wilayah. Tipe politik luar negeri Korea Selatan di masa pemerintahan yang baru merdeka terlihat masih sangat sederhana dan tidak rumit. Di mana fokus kebijakan lebih kepada perbaikan kondisi fungsi dan sistem dalam negeri dan melindungi wilayah dari invasi Korea Utara (Puimara, 2008).

Persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah menyeret Korea Selatan dan Korea Utara dalam pusaran konflik sehingga membuat kondisi politik di Semenanjung Korea pada saat itu menjadi buruk. Hal ini mengakibatkan masalah reunifikasi semakin berubah ke arah permusuhan. Puncak dari konflik persaingan ini adalah pecahnya Perang Korea pada 25 Juni 1950 di mana pasukan Korea Utara mulai melakukan infiltrasi, melintasi garis perbatasan 38 derajat. Serangan mendadak ini berhasil menekan dan mengalahkan Korea Selatan.

Penandatanganan kesepakatan gencatan senjata pada 27 Juli 1953 tidak menyurutkan ketegangan politik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kebijakan Korea Selatan tetap lebih mengutamakan kekuatan militer untuk mengawal pemerintahan dari ancaman Korea Utara. Meskipun di awal masa pemerintahan Korea Selatan lebih condong ke otoriterisme, akan tetapi kebijakan luar negeri dengan Amerika saat itu cukup baik. Hal ini dilakukan untuk mendukung Korea Selatan agar dapat bertahan dari gejolak politik dalam dan luar negeri (Puimara, 2008). Korea dan Amerika Serikat bersama-sama menandatangani *Mutual Defense Treaty* pasca Perang Korea berakhir. Perjanjian ini merupakan kerjasama keamanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk saling menjaga keamanan masing-masing negara terhadap ancaman negara lain. Karena hal ini, Amerika Serikat kemudian mempertahankan keberadaan pasukan militernya di wilayah Korea Selatan hingga saat ini.

Kondisi politik dalam negeri yang belum stabil mempengaruhi kondisi ekonomi negara yang saat itu masih terbilang lemah dengan hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama negara. Upaya negara untuk mengembangkan ekonominya dalam sektor pertanian adalah dengan memelihara hubungan baik dengan negara-negara pengimpor hasil pertanian. Hal ini dilakukan agar negara bisa mendapatkan devisa dari hasil pertanian. Selain itu, Korea Selatan di masa pemerintahan Sygman Rhee juga masih sangat sederhana dan belum mengenal industrilisasi sehingga hasil pertanian adalah komoditi andalan dari negara. Oleh karenanya, hubungan luar negeri yang dibangun merupakan upaya negara untuk mendapatkan konsumen untuk hasil pertaniannya (Puimara, 2008).

Ekonomi Korea Selatan semakin berkembang pesat di awal tahun 1960-an di mana Korea Selatan termasuk dalam peringkat negara industrialisasi terbesar dunia (Manyin et al., 2017). Keberhasilan pemerintahan Park Chung Hee ini tidak lepas dari perubahan kebijakan politik luar negerinya yang mulai terbuka dan berupaya terus belajar dari negara lain. Kebijakan politik yang terbuka membuat semakin majunya perindustrian Korea Selatan yang diawali dengan kebijakan pemerintah yang membuka diri terhadap masuknya budaya dan ilmu pengetahuan dari luar (Puimara, 2008). Hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat juga berkembang semakin dekat di mana Korea Selatan telah menjadi salah satu patner dagang terbesar Amerika Serikat selama dua dekade. Korea Selatan mulai berkembang menjadi negara yang makmur dan sejahtera melalui pengembangan teknologi dan industrialisasi. Perkembangan politik luar negeri yang mulai terbuka, membuat kebijakan Korea Selatan pada masa pemerintahan ini menjadi pertimbangan penting bagi kebijakan luar negeri setiap negara di sekitarnya. Hal ini dikarenakan Semenanjung Korea sebagai pusat geostrategis kawasan Asia Timur (Aldikawati, 2015). Letak strategis wilayah Semenanjung Korea yang dikelilingi negara maju membuat banyaknya kepentingan negara lain di Korea Selatan. Pemerintahan dengan gaya politik yang mulai terbuka, membuat Korea Selatan mulai melakukan berbagai kerjasama politik dan ekonomi dengan beberapa negara.

2.1.2 Korea Selatan di bawah Pemerintahan Demokratis

Kebijakan politik luar negeri Korea Selatan yang semakin terbuka, berdampak pula pada gaya kepemimpinan pemerintahannya. Kontrol militer terhadap pemerintahan mulai hilang dan berganti ke sipil di masa pemerintahan Kim Young Sam pada tahun 1992 hingga 1997. Akan tetapi, pertahanan keamanan kawasan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam politik luar negeri di masa pemerintahan tersebut. Hal ini terlihat dari misi militer Korea Selatan yang saat itu masih menekankan pertahanan terhadap agresi eksternal akibat ancaman keamanan dari Korea Utara. Perbedaan dari kebijakan luar negeri masa pemerintahan saat itu dengan sebelumnya adalah pada sifat kebijakan luar

negeri yang menyangkut pertahanan keamanan yang lebih persuasif (Puimara, 2008).

Transformasi politik yang terjadi di Korea Selatan juga mendorong dilakukannya reformasi politik di mana tujuannya sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) (Puimara, 2008). Hal ini membawa dampak positif bagi hubungan Korea Selatan dan Korea Utara di mana perubahan ini berimbas pada kebijakan Kim Young Sam dalam hubungannya dengan Korea Utara. Salah satu kebijakannya adalah membebaskan tahanan politik Korea Utara yang berjumlah sekitar empat puluh ribu orang. Kebijakan politik luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara mulai menjadi persuasif dan lebih fleksibel di masa pemerintahan ini.

Sistem pemerintahan Korea Selatan yang baru berganti dari otoriter menjadi demokrasi harus merasakan tantangan krisis ekonomi yang melanda benua Asia pada tahun 1997 di bawah kepemimpinan Kim Dae-Jung. Krisis ini memperbaharui sistem ekonomi Korea Selatan dengan privatisasi, deregulasi, menekan biaya sosial dan peningkatan penggunaan pekerja honorer tak tetap dan buruh imigran. Ketiadaan disiplin pasar dan kurangnya sistem transparansi membuat semakin besarnya krisis ini melanda Korea Selatan. Akibatnya, angka pengangguran semakin meningkat lebih dari 1.7 juta orang di kuartel pertama 1999 (Klinger, 2015).

Keadaan ekonomi Korea Selatan yang buruk tidak terlalu mempengaruhi hubungannya dengan Amerika Serikat. Akan tetapi, munculnya kebijakan Matahari Bersinar (*Sunshine Policy*) mulai mempengaruhi hubungan keduanya. Kebijakan Matahari Bersinar (*Sunshine Policy*) merupakan kebijakan politik luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara yang lebih mengedepankan pendekatan kerjasama dan dialog dalam menghadapi konflik. Hal ini terkait dengan isu reunifikasi Korea yang meningkat di masa pemerintahan ini. Keberadaan *Sunshine Policy* menunjukkan posisi tawar Korea Selatan di kawasan Asia Timur semakin kuat meskipun terkesan tunduk terhadap Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan politik Korea Selatan yang saat itu turut mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat, terutama dalam

menghadapi permasalahannya dengan Korea Utara.

Setelah masa pemerintahan Kim Dae-Jung berakhir, Korea Selatan berada di bawah kepemimpinan Roh Moo-hyun di mana kebijakan kesejahteraan tidak dapat diperluas dengan kekuatan dan karakteristik liberal seperti yang dilakukan Presiden Kim. Kebijakan Korea Selatan pada masa pemerintahan ini lebih fokus pada peningkatan pelayanan sosial dan investasi modal manusia (Klinger, 2015). Kebijakan *Sunshine Policy* semakin ditegaskan dalam pemerintahan ini, sehingga penyelesaian krisis secara damai lebih diutamakan. Keyakinan akan kesetaraan dan kesejajaran dengan Amerika Serikat juga mewarnai kebijakan Presiden Roh. Hal ini membuat kebijakan Korea Selatan menjadi lebih tegas dan jelas dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang terlihat masih tergantung dengan kehadiran Amerika Serikat. Presiden Roh meyakini bahwa Korea Selatan merupakan pemain kunci dalam kemelut nuklir Korea Utara.

Keyakinan akan kesejajaran dengan Amerika Serikat meningkatkan kemandirian Korea Selatan, lepas sedikit demi sedikit dari investasi asing, termasuk dalam penyelesaian konflik dengan Korea Utara. Proses demokratisasi yang berjalan lancar membuat hak asasi manusia semakin dijunjung tinggi dan kemudian menciptakan sikap anti Amerika. Persepsi ini diperkuat dengan krisis nuklir Semenanjung Korea yang terjadi pada tahun 2002 yang dipicu akibat pernyataan Bush mengenai Korea Utara sebagai *Axis of Evil*. Krisis nuklir Semenanjung Korea tidak hanya menurunkan stabilitas negara Korea Selatan, tetapi juga stabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Meskipun begitu, pemerintahan Korea Selatan masih memilih upaya dialog dan menentang tindakan keras dan tegas yang diusulkan Amerika Serikat dalam menyelesaikan krisis nuklir ini. Korea Selatan melihat konflik ini sebagai konflik antara Korea Utara dan Amerika Serikat sehingga lebih cenderung menempatkan diri sebagai mediator konflik.

Krisis nuklir Semenanjung Korea telah mengganggu stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi Korea Selatan yang membuat semakin lemahnya ketahanan dalam negeri. Meskipun hanya bertindak sebagai mediator, Korea Selatan masih memiliki peran penting dalam setiap keputusan yang diambil kedua negara yang

berkonflik dalam menyelesaikan krisis tersebut. Hal ini menunjukkan Korea Selatan memiliki posisi tawar (*bagaining power*) yang legal, kuat, dan mempunyai pengaruh dalam penentuan keputusan. Selain itu, upaya Korea Selatan untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan Korea Utara serta berperan aktif dalam dialog penyelesaian konflik membuat kepentingan Korea Selatan tetap terjaga dan terkontrol.

Pemerintahan yang demokrasi memiliki pengaruh terhadap kekuatan ekonomi Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Lee. Sistem pemerintahan Presiden Lee berhasil menaikkan angka GDP negara hingga 9.3 persen dari 2009 hingga 2013, lebih tinggi 6.9 persen dari pemerintahan Presiden Roh (Klinger, 2015). Peningkatan ekonomi yang pesat dikarenakan sistem kepemimpinan Lee yang terbuka, melakukan berbagai kerjasama ekonomi dengan berbagai negara, termasuk Cina. Hubungan diplomatik Korea Selatan dengan Amerika Serikat di masa pemerintahan ini pun menjadi lebih baik dan terbilang sangat erat dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Hubungan pribadi yang baik antara Presiden Lee dan Presiden Obama mempengaruhi hubungan kedua negara. Kebijakan-kebijakan yang diambil, baik oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan keduanya tidak bertentangan dan saling mendukung satu sama lain. Sedangkan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara semakin memburuk. Presiden Lee menghentikan kebijakan *Sunshine Policy* dengan alasan uji coba nuklir Korea Utara dan isu HAM di Korea Utara (Nidia, 2017).

Presiden Lee menilai bahwa dibutuhkan strategi yang lebih keras untuk menghentikan uji coba nuklir Korea Utara yang menghambat reunifikasi Korea. Untuk itu, semua bentuk kerjasama bantuan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya akan dihentikan hingga Korea utara bersedia untuk membongkar nuklir dan berhenti melakukan serangan terhadap Korea Selatan. Alasan lainnya adalah isu HAM yang menjadi perhatian khusus Presiden Korea Selatan karena isu tersebut berkaitan dengan kepentingan negara tersebut. Ketidakadilan dan kesengsaraan yang dialami rakyat Korea Utara akibat sistem pemerintahan yang komunis membuat Presiden Lee dengan tegas memastikan bahwa isu-isu HAM di Korea Utara harus segera diatasi (Nidia, 2017). Perubahan ekonomi dan politik di

Korea Selatan semakin menunjukkan peningkatan posisi tawar Korea Selatan di Asia Timur. Lahirnya Korea Selatan sebagai salah satu negara maju di Asia Timur, mempengaruhi kekuatan politik negara tersebut di kawasan tersebut.

Berbeda dengan presiden sebelumnya, kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Park tidak terlalu bagus. Program kerjanya tidak dapat berjalan dengan semestinya akibat ekonomi dunia yang sedang stagnan. Akan tetapi, hubungan diplomatik Korea Selatan dengan Amerika Serikat semakin ditegaskan yang ditandai dengan diserahkannya ahli komando militer kepada Korea Selatan jika terjadi perang. Amerika Serikat memberikan kepercayaan yang semakin tinggi terhadap kemampuan militer Korea Selatan untuk bereaksi pada segala ancaman yang datang. Hal ini menunjukkan posisi tawar Korea Selatan yang semakin meningkat untuk dapat memberikan kebijakan secara mandiri dalam setiap ancaman yang dihadapi. Akan tetapi, skandal korupsi yang melibatkan perusahaan konglomerat Korea Selatan membuat Park Guen-hye lengser pada 10 Maret 2017 dan digantikan oleh Moon Jae-In melalui pemilihan langsung.

Moon Jae-In merupakan Presiden Korea Selatan yang memimpin negara tersebut saat ini. Kebijakan politik yang ditetapkan di bawah pemerintahan Presiden Moon hampir sama dengan kebijakan sebelumnya. Presiden Moon tidak banyak mengubah dan hanya melanjutkan beberapa kebijakan yang telah diambil sebelumnya, termasuk kebijakan pemasangan THAAD yang disepakati dengan Amerika Serikat. Meskipun terdapat beberapa negara yang menolak keras terhadap kebijakan tersebut, namun Presiden Moon tidak menghentikan rencana tersebut. Hubungan diplomatik dengan Cina yang terganggu akibat pemasangan sistem anti rudal THAAD, membuat Korea Selatan mengalami kerugian ekonomi cukup besar mengingat Cina merupakan mitra ekonomi yang sangat penting. Hal ini mendorong Korea Selatan untuk melakukan strategi kebijakan alternatif untuk meminimalisir kerugian tersebut. Untuk itu, Korea Selatan meningkatkan ekspansinya ke beberapa negara Asia lainnya, termasuk negara-negara ASEAN. Kerjasama politik dan ekonomi dengan negara-negara lainnya akan mengurangi ketergantungan Korea Selatan terhadap pasar Cina.

2.2 Program Nuklir Korea Utara sebagai Tantangan Keamanan Korea Selatan di Semenanjung Korea

Wilayah Semenanjung Korea yang berfungsi sebagai gerbang invasi Cina, Uni Soviet, Jepang, dan Amerika Serikat saat Perang Dunia II membuat kawasan tersebut turut rentan akan konflik. Terlebih ketika Korea dikuasai oleh Cina, Korea dianggap ancaman bagi Jepang, begitu pula sebaliknya di mana Korea dianggap sebagai ancaman bagi Cina dan Uni Soviet ketika dikuasai oleh Jepang. Pentingnya Semenanjung Korea bagi kepentingan nasional negara-negara besar, seperti Cina, Jepang, Uni Soviet (yang sekarang menjadi Rusia), dan Amerika Serikat untuk membentuk dan mempertahankan *balance of power* di kawasan Asia Timur membuat Korea menjadi suatu kawasan yang strategis (Thalib, 2012). Kondisi ini mendorong Korea untuk lebih memperhatikan kebijakan politik luar negerinya terkait dengan pertahanan dan keamanan negaranya.

Terpecahnya Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara membuat hubungan keduanya menjadi bersitegang. Sejarah masa lalu, perbedaan ideologi dan kondisi negara, serta ekonomi membuat semakin buruknya hubungan keduanya. Upaya reunifikasi yang selalu menemui jalan buntu juga menambah ketegangan diantara keduanya. Kondisi ini mempengaruhi pandangan Korea Selatan terhadap Korea Utara, yang dianggap selain sebagai negara tetangga paling dekat, namun juga sebagai ancaman serius bagi Korea Selatan. Akibatnya, Korea Selatan bersikap lebih siaga untuk menjaga pertahanan keamanan negaranya, terlebih dengan adanya pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara.

Pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara menjadi ancaman paling besar bagi Korea Selatan. Hal ini terkait dengan kemampuan dan niat Korea Utara dalam mengembangkan nuklirnya. Semakin tinggi kemampuan nuklir yang dihasilkan oleh Korea Utara, maka akan berbanding lurus dengan daya ledak dan luas jangkauan yang dihasilkan nuklir tersebut. Hal ini tentu akan meningkatkan potensi ancaman yang dirasakan. Tidak hanya bagi Korea Selatan sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Korea Utara, tetapi juga negara-negara lainnya seperti Cina dan Jepang melihat besarnya potensi kerusakan yang

mungkin ditimbulkan oleh nuklir tersebut. Penggunaan nuklir yang belum jelas maksud dan tujuannya membuat semakin tingginya kekhawatiran Korea Selatan terhadap potensi ancaman serangan Korea Utara. Status Korea Utara yang bukan termasuk dalam negara yang tergabung dalam Perjanjian Non-poliferasi Nuklir menunjukkan biasanya maksud dan tujuan program nuklir Pyongyang. Meskipun Korea Utara pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya senjata nuklir yang selama ini dikembangkan bukan ditujukan kepada Korea Selatan melainkan karena Amerika Serikat, namun hal ini tetap dianggap sebagai ancaman bagi Korea Selatan. Selain karena sejarah pahit yang pernah terjadi, hal ini juga dikarenakan sikap Korea Utara yang seringkali tidak konsisten dan menggunakan Korea Selatan sebagai alat untuk mengancam Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan sikap Korea Utara yang seringkali memberikan pernyataan untuk membunuh Korea Selatan dengan senjata nuklir yang dikembangkannya sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat. Niat tersebut terbukti dengan latihan simulasi perang yang sering kali digelar untuk Korea Selatan.



Gambar 2.1 Unit pasukan payung Tentara Rakyat Korea, melakukan latihan menyerbu replika Gedung Biru yang merupakan kantor presiden Korea Selatan. (Sumber: Kompas, 2016)

Program nuklir Korea Utara dimulai pada awal tahun 1950-an. Pemerintah selanjutnya mulai mendirikan Lembaga Penelitian Tenaga Atom dan Akademi Ilmu Pengetahuan pada bulan Desember 1952 (Nuclear Threat Initiative, 2011). Namun nuklir baru mulai dikembangkan ketika Korea Utara melakukan perjanjian

kerjasama dengan Uni Soviet, berupa piagam pendiri Lembaga Bersama Uni Soviet untuk penelitian nuklir pada Februari 1956. Pasca perjanjian tersebut, Korea Utara mulai mengirim para ilmuwan dan teknisinya ke Uni Soviet untuk pelatihan. Tak lama kemudian, Uni Soviet dan Korea Utara melakukan perjanjian kembali mengenai penggunaan energi nuklir secara damai, termasuk mengenai bantuan Uni Soviet untuk mendirikan sebuah kompleks penelitian nuklir di Yongbyon, Provinsi Pyongan Utara (NTI, 2018).

Pada awal 1960-an, Uni Soviet memberikan bantuan secara teknis kepada pusat penelitian nuklir milik Korea Utara Yongbyon, termasuk instalasi reaktor riset nuklir IRT-2000 Soviet dan fasilitas terkait. Reaktor riset nuklir ini kemudian mulai dikembangkan Korea Utara dengan bantuan Uni Soviet, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Akan tetapi, Uni Soviet menanggihkan semua bantuan militernya untuk Korea Utara di akhir tahun 1962 akibat dukungan Korea Utara untuk Beijing dalam perpecahan Uni Soviet. Meskipun demikian, Moratorium yang dibangun oleh Uni Soviet tetap berjalan hingga tahun 1965.

Di bawah pemerintahan Kim Il-Sung, Korea Utara mulai mencari cara lain untuk mengembangkan sistem nuklirnya tanpa bantuan Uni Soviet. Korea Utara mulai membangun Akademi Militer Hamhung untuk membina personel yang mampu mengembangkan misil jarak menengah dan jauh. Kim menyatakan bahwa negaranya harus dapat membuat roket yang mampu terbang sejauh Jepang. (Bermudez, 1999). Buruknya hubungan dengan Uni Soviet membuat Korea Utara mulai beralih ke Rusia untuk memfasilitasi upaya pengembangan rudalnya. Meskipun demikian, sebagian besar program nuklir Korea Utara dikembangkan tanpa bantuan asing yang signifikan. Hubungan Korea Utara dan Uni Soviet mulai kembali membaik di tahun 1964 setelah pergantian Perdana Menteri Soviet, Nikita Khrushchev pada Oktober 1964. Di lain sisi, hubungan Rusia dan Korea Utara mulai memburuk tidak lama setelah Pemimpin Mao Zedong menolak permintaan Kim Il-Sung untuk memberikannya teknologi senjata nuklirnya dan diikuti dengan tes nuklir pertama Rusia pada Oktober 1964. Hal ini membuat negosiasi untuk bantuan militer lebih lanjut antara Korea Utara dan Uni Soviet kembali dibuka, termasuk menyediakan rudal yang terdiri dari baterai peluncuran,

radar akuisisi target, dan peralatan pendukung. Rudal tambahan yang diterima Uni Soviet hingga tahun 1968 kurang lebih sebanyak 32 rudal dan delapan peluncur.

Korea Utara memperluas lembaga pendidikan dan penelitiannya untuk mendukung program nuklir bagi penerapan sipil dan militer di akhir 1960-an. Pada awal 1970-an, Korea Utara mulai menggunakan teknologi sendiri untuk mengembangkan reaktor riset IRT-2000 dan juga mendapatkan teknologi pemrosesan ulang plutonium dari Uni Soviet. Hubungan Korea Utara dan Rusia kembali membaik setelah penandatanganan perjanjian militer untuk akuisisi, pengembangan, dan produksi sistem persenjataan modern pada bulan September 1971. Perjanjian tersebut termasuk akuisisi rudal Rusia, transfer teknologi penelitian dan pengembangan rudal Rusia, dan pelatihan personil Korea Utara di Rusia. Hasilnya adalah bantuan Rusia dalam mereorganisasi program perakitan dan pemeliharaan rudal Soviet. Bantuan militer yang diberikan Rusia kepada Korea Utara tidak menghentikan kerjasama militer dengan Uni Soviet.

Korea Utara terus melakukan perbaikan dan perbaruan pada program nuklirnya. Kekhawatiran Amerika Serikat dan Uni Soviet terhadap program nuklir Korea Utara yang berubah fungsi menjadi senjata rudal mendorong keduanya untuk menekan Korea Utara agar menandatangani perjanjian pengamanan trilateral pada Juli 1977. Perjanjian ini mengatur bahwa reaktor riset IRT-2000 dan perakitan penting di Yongbyon berada dalam pengawasan IAEA. Adanya pengawasan dari IAEA membuat Korea Utara harus selalu melaporkan segala aktivitas terkait dengan reaktor nuklirnya dan menutup perakitan nuklir di Yongbyon. Meskipun terikat perjanjian, Korea Utara tetap menjalankan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi untuk merakit kembali rudal balistik dan memproduksi uranium, bahan pembuatan nuklir, bahkan tanpa adanya bantuan dari Uni Soviet maupun Rusia.

Pyongyang melakukan ekspansi besar-besaran di awal 1980-an, yaitu membangun fasilitas penggilingan uranium, wilayah fabrikasi bahan bakar, reaktor nuklir 5 MW, dan lembaga penelitian dan pengembangan. Selain itu, Korea Utara juga mulai bereksperimen dengan uji bahan peledak tinggi yang diperlukan untuk membangun mekanisme pemicu bom nuklir. Korea Utara juga mulai membangun

reaktor nuklir 50 MW di Yongbyon pada tahun 1984 dan memperluas fasilitas pemrosesan uraniumnya. Selain reaktor nuklir, Korea Utara juga mulai mengembangkan akuisisi teknologi reaktor air ringan pada awal hingga pertengahan 1980-an. Bersamaan dengan itu, Korea Utara juga mengadaptasi perancangan reaktor gas-grafit yang serupa dengan desain reaktor Calder Hall yang pertama kali dibangun di Inggris pada 1950-an.

Aktivitas nuklir Korea Utara yang berkembang signifikan menjadi perhatian masyarakat dunia. Setelah uji coba rudal Scud B yang pertama dilakukan Korea Utara pada April 1984 membuat Uni Soviet menekan Kim Il-Sung untuk bergabung dalam Non-Poliferasi Senjata Nuklir (NPT) pada 12 Desember 1985. Penandatanganan perjanjian ini membuat Korea Utara bersedia untuk tidak akan menyebarkan nuklirnya. Akan tetapi, Korea Utara mulai menunjukkan keberatannya pada isi perjanjian tersebut tidak lama setelah bergabung dalam NPT. Korea Utara tidak terima bahwa NPT melakukan pengawasan dalam segala aktivitas nuklir yang akan dilakukannya selama tujuh tahun. Meskipun tergabung dalam NPT, Korea Utara tidak menghentikan pengembangan nuklirnya. Korea Utara melakukan operasi fasilitas penyulingan uranium dan transformasi material nuklir pada tahun 1986 dan diikuti pembangunan pabrik tenaga nuklir kelas 200 MW pada tahun 1989 di Taechon. Aktivitas nuklir Korea Utara ini akhirnya terdeteksi oleh satelit Amerika Serikat pada tahun 1989 juga.

Protes Korea Utara karena tidak disertakannya Korea Selatan dalam negara yang harus bebas dari senjata nuklir membuat Amerika Serikat pada September 1991 mengumumkan untuk menarik senjata nuklirnya dari Korea Selatan. Selanjutnya, Presiden Roh Tae Woo menyatakan pada 18 Desember 1991 bahwa Korea Selatan telah bebas dari senjata nuklir. Baik Korea Utara dan Korea Selatan keduanya menandatangani Deklarasi bersama tentang Denuklirisasi Semenanjung Korea. Perjanjian tersebut mengatur kedua belah pihak untuk tidak menguji, memproduksi, menerima, memiliki, menyimpan, menyebarkan, atau menggunakan senjata nuklir. Selain itu, kedua pihak juga harus membatalkan kepemilikan fasilitas pemrosesan ulang nuklir dan pengayaan uranium. Terdapat

rezim inspeksi bilateral yang bertugas mengawasi aktivitas kedua pihak, namun tidak membuat keduanya sukses menerapkan segala ketentuan perjanjian.

Korea Selatan beserta Amerika Serikat masih mengandalkan negosiasi dalam menghentikan program nuklir Korea Utara. Perjanjian perlindungan IAEA kemudian ditandatangani Korea Utara pada 30 Januari 1992 demi mencegah Korea Utara untuk menyebarkan nuklirnya. Perjanjian ini memaksa Korea Utara untuk melaporkan mengenai fasilitas dan bahan nuklir yang dimilikinya dan memberikan akses IAEA untuk memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dari laporan Korea Utara. Terdapat perbedaan analisis IAEA dengan laporan yang disampaikan Korea Utara mengenai dua situs limbah nuklir yang dicurigai sebagai tempat pengolahan kembali plutonium. Akan tetapi, Korea Utara menolak untuk memberikan IAEA akses untuk memeriksanya. Oleh karena itu, IAEA meminta PBB untuk mengesahkan pemeriksaan khusus ad hoc, yang mendapatkan reaksi keras oleh Korea Utara, yaitu penarikan diri dari NPT pada 12 Maret 1993. Hal ini mendorong Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi bilateral yang intens demi mendesak Korea Utara membatalkan penarikan dirinya dari NPT. Sementara Korea Utara masih terus mengoperasikan reaktor 5 MW di Yongbyon dan mulai melepaskan batang bahan bakar reaktornya tanpa pengawasan IAEA. Tindakan ini mengawali adanya krisis nuklir pertama di Semenanjung Korea.

Amerika Serikat memiliki peran besar dalam berbagai proses negosiasi dengan Korea Utara demi menghentikan program nuklirnya. Korea Utara dan Amerika Serikat kembali membuat kesepakatan pada Oktober 1994 di mana Korea Utara harus menutup reaktor nuklir di Yongbyon. Sebagai gantinya Amerika Serikat akan memberikan dua reaktor daya air ringan dan 500.000 ton bahan bakar minyak per tahun hingga reaktor pertama tiba. Hingga tahun 2001, kesepakatan yang selama ini dibuat belum juga mencapai kepuasan baik bagi Korea Utara maupun Amerika Serikat. Kemudian, masyarakat internasional dibuat terkejut dengan ditemukannya bukti adanya fasilitas program uranium (HEU), teknologi rudal balistik, pada tahun 2002 yang dimiliki Korea Utara. Selanjutnya Korea Utara menarik pembekuan fasilitas nuklirnya dan menyatakan keluar dari NPT pada 11 Januari 2003 setelah Amerika Serikat menangguk

pengiriman bahan bakar minyak. Hal ini menciptakan adanya perundingan enam negara (*six party talks*) yang meliputi Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan China.

Babak pertama perundingan enam negara dimulai pada bulan Agustus 2003, yang disusul enam bulan kemudian putaran babak kedua pada Februari 2004, dan putaran ketiga pada Juni 2004. Namun, enam negara harus mengulur waktu selama lebih dari satu tahun untuk melanjutkan perundingan tersebut dikarenakan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama Amerika Serikat dan Korea Utara. Sementara proses perundingan enam pihak terhenti, Korea Utara menutup reaktor 5 MW pada April 2005 dan membuang bahan bakar yang habis. Namun, pada Juli 2005 Korea Utara mengumumkan bahwa negaranya telah mampu memproduksi senjata nuklir. Hal ini membuat diadakannya kembali perundingan enam negara yang sempat terhenti setahun lebih. Putaran keenam perundingan enam negara pada 19 September 2005 menghasilkan Pernyataan Bersama di mana Korea Utara akan meninggalkan program nuklirnya dan kembali bergabung dengan NPT dan rezim perlindungan IAEA. Sementara itu, Amerika Serikat juga menyatakan bahwa tidak ada niatan untuk menyerang Korea Utara dengan senjata nuklir atau pun konvensional dan juga menegaskan bahwa tidak ada senjata nuklir yang dikerahkan di Korea Selatan. Selain itu, enam negara juga sepakat bahwa Deklarasi Bersama 1992 tentang Denuklirisasi Semenanjung Korea harus diamati dan diimplementasikan.

Pernyataan Bersama yang telah disepakati bersama pada kenyataannya tidak dapat berjalan selama lebih dari 18 bulan, dan Perundingan Enam Negara pada akhirnya menemui jalan buntu. Hal ini terjadi setelah Pyongyang menolak untuk melaksanakan bagiannya dalam kesepakatan Pernyataan Bersama sebelum Amerika Serikat mencabut sanksi ekonomi yang diberikan kepada Korea Utara. Selain itu, perbedaan persepsi antara Korea Utara dan Amerika Serikat mengenai isi Pernyataan Prinsip membuat tidak tercapainya kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak. Akibatnya, Perundingan Enam Negara akhirnya menemui jalan buntu. Negosiasi yang gagal dilakukan, mengakibatkan uji coba nuklir Korea Utara yang pertama pada Oktober 2006. Meskipun hasil uji coba

nuklir tersebut kurang dari 1 kiloton, namun tindakan tersebut tetap membuat semakin buruknya krisis nuklir Semenanjung Korea. Pengujian nuklir ini mendapatkan sanksi dari PBB dengan dijatuhkannya Resolusi 1718 PBB kepada Korea Utara.

Untuk menyelesaikan krisis nuklir Korea, negosiasi kembali dilakukan dengan melanjutkan Perundingan Enam Negara yang sempat absen selama setahun lebih. Perundingan berakhir dengan kesepakatan awal untuk implementasi Pernyataan Bersama pada Februari 2007. Korea Utara akan meninggalkan semua senjata dan program nuklir yang ada dengan batas waktu hingga 60 hari untuk menutup semua fasilitas nuklir di Yongbyon serta kembali pada NPT dan pengawasan IAEA di bawah pengawasan IAEA. Sebagai imbalan, Amerika bersedia untuk memberikan sekitar \$25 juta aset Korea Utara dan bersama negara lainnya menyediakan bantuan energi untuk Korea Utara. Perjanjian ini membukakan pintu dan membangun kembali hubungan Korea Utara dengan badan perlindungan IAEA. Korea Utara mulai menutup dan menyegel fasilitas nuklir utama di Yongbyon di bawah pengawasan IAEA pada bulan Juli 2007. Perundingan Enam Negara kemudian mendorong Korea Utara untuk menonaktifkan fasilitas nuklir utamanya dan menyerahkan deklarasi lengkap dan benar dari semua program nuklirnya pada 31 Desember 2007.

Alih-alih berhasil memenuhi tenggat waktu 31 Desember untuk menyerahkan deklarasi nuklirnya, sebaliknya kegiatan produksi plutonium pada fasilitas utama Korea Utara terus berkembang. Kecurigaan adanya kerjasama nuklir Korea Utara dengan Suriah membuat dimasukkannya Korea Utara ke dalam daftar negara sponsor terorisme. Hampir enam bulan setelah tenggat waktu 31 Desember, Korea Utara akhirnya mengajukan deklarasi nuklirnya pada 26 Juni 2008. Amerika Serikat kemudian mengumumkan rencananya untuk menghapus Korea Utara dari daftar negara sponsor terorisme dan mencabut beberapa sanksi berdasarkan Perdagangan dengan Enemy Act. Sejalan dengan aksi pemerintahan Amerika Serikat, Korea Utara kemudian menghancurkan menara pendingin di reaktor 5 MW Yongbyon.

Rencana penghapusan Korea Utara dari daftar negara sponsor terorisme

belum juga direalisasikan oleh Amerika Serikat. Hal ini membuat Korea Utara juga menunda untuk memenuhi komitmennya sendiri. Selanjutnya, Pyongyang mengumumkan pada akhir Agustus 2008 bahwa negaranya telah memulihkan fasilitas nuklir di Yongbyon dan melarang IAEA untuk mengakses situsnya. Kondisi ini tidak berlangsung lama karena Korea Utara setuju untuk melanjutkan penonaktifan fasilitas nuklirnya dan perizinan pengawasan IAEA setelah Amerika Serikat akhirnya menghapus Korea Utara dari daftar negara sponsor terorisme. Negosiasi Enam Negara pun kembali dilanjutkan di Beijing pada Desember 2008 untuk memetakan rencana verifikasi kecacatan program nuklir Korea Utara, termasuk mengambil sampel nuklirnya. Akan tetapi, negosiasi gagal mencapai kesepakatan mengenai protokol verifikasi dan masalah tetap terhenti.

Masyarakat internasional kemudian kembali dikejutkan dengan peluncuran roket yang dilakukan Korea Utara pada Maret 2009, yang dilanjutkan dengan pengusiran inspektur IAEA dan Amerika Serikat dari Korea Utara serta membangun kembali reaktor 5 MW di Yongbyon. Tindakan Korea Utara ini tentu telah bertentangan dengan perjanjian sebelumnya di Perundingan Enam Negara. Tidak hanya itu, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya yang kedua pada Mei 2009. Uji coba kedua ini memiliki kekuatan dan teknologi lebih tinggi dari sebelumnya di mana hasil tes menunjukkan kekuatan rudal sekitar 4 kiloton. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan Resolusi 1874 untuk Korea Utara atas aksi provokatif ini. Sementara Korea Utara menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk kembali ke Perundingan Enam Negara dan juga tindakannya sudah tidak terikat dengan kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya.

Ketegangan terus meningkat selama tahun 2010 dan 2011 di mana Korea Utara diketahui masih terus melanjutkan pembangunan reaktor air ringan di Yongbyon pada Maret 2010. Ahli nuklir Amerika Serikat memperkirakan bahwa eksperimen reaktor air ringan Korea Utara mungkin akan selesai tahun depan dan mulai beroperasi selama dua atau tiga tahun lagi. Selain itu, pembangunan fasilitas pengayaan uranium di Yongbyon dengan 2.000 P-2 sentrifugal dalam enam cascade diperkirakan telah selesai. Keadaan ini meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea, termasuk juga hubungannya dengan Amerika Serikat karena

peningkatan kekuatan yang terus dilakukan Korea Utara.

Kesediaan tanpa prasyarat untuk kembali melakukan Perundingan Enam Negara akhirnya diterima oleh Korea Utara pada 15 Maret 2011, yang membahas mengenai program pengayaan uranium Korea Utara. Serangkaian perundingan bilateral antara Amerika Serikat dan Korea Utara dilakukan setelah Kim Jong Un mulai memimpin pada Desember 2011 dan menghasilkan perjanjian Leap Day pada 29 Februari 2012. Korea Utara setuju untuk menghentikan aktivitas nuklirnya sebagai imbalan atas bantuan pangan Amerika Serikat. Akan tetapi, perjanjian ini harus berakhir setelah Kim Jong Un berusaha meluncurkan satelit ke orbit menggunakan roket Unha pada 12 April 2012 dan dilanjutkan dengan peluncuran roket Unha tambahan pada Desember 2012. Aksi Korea Utara ini dianggap Amerika Serikat sebagai pelanggaran atas perjanjian Leap Day sehingga Dewan Keamanan PBB menjatuhkan Resolusi 2087 yang menuntut Korea Utara untuk mengakhiri program nuklir dan rudalnya.

Aksi provokatif Korea Utara semakin meningkat di bawah kepemimpinan Kim Jong-Un. Hal ini dapat dilihat dari berbagai uji coba nuklir yang terus menerus dilakukan Korea Utara meskipun telah dijatuhkan sanksi oleh PBB dan dikecam oleh masyarakat internasional. Uji coba nuklir yang ketiga dilakukan Korea Utara pada 12 Februari 2013 di Fasilitas Uji Nuklir Punggyeri. Uji coba tersebut dilaporkan telah mengakibatkan guncangan seismik berkekuatan 5,1 SR di sekitar lokasi. Tidak hanya itu, pernyataan provokatif disampaikan Korea Utara yang mengklaim telah berhasil menguji bom atom ringan dan miniatur. Hal ini tentu dianggap sebagai ancaman serius bagi negara-negara di sekitarnya, terutama Korea Selatan sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Korea Utara.

Selanjutnya, media Korea Utara mengumumkan bahwa Pyongyang telah memulai kembali aktivitas fasilitas nuklir utamanya di Yongbyon. Meskipun menara pendingin telah dihancurkan, namun Korea Utara tetap melakukan aktivitas nuklirnya dengan memanfaatkan pipa pendingin dari reaktor 5 MW yang dihubungkan ke sungai yang berdekatan. KCNA kemudian mengumumkan pada Maret 2014 mengenai niat Korea Utara untuk melakukan bentuk baru pengujian

nuklirnya. Sebagai bentuk pertahanan terhadap ancaman Korea Utara, Korea Selatan semakin menegaskan aliansinya dengan Amerika Serikat. Keduanya sepakat untuk meningkatkan intensitas latihan gabungan militer demi mempertahankan keamanan Korea Selatan dari serangan Korea Utara. Enam bulan kemudian tepatnya pada September 2015, satelit Amerika Serikat menangkap adanya peningkatan aktivitas di situs uji coba nuklir Punggye-ri.

Media Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa negara itu telah mampu menciptakan bom hidrogen pada Desember 2015. Akan tetapi Amerika Serikat menyangsikan kebenaran dari berita tersebut. Korea Utara mencoba membuktikan kebenaran dari berita tersebut dengan menggelar uji coba nuklir yang keempat pada 6 Januari 2016 yang diklaim sebagai bom hidrogen. Akan tetapi Amerika Serikat dan sekutunya kembali meragukan kebenaran klaim tersebut. Laporan USGS menunjukkan bahwa kekuatan guncangan yang dihasilkan uji coba nuklir tersebut serupa dengan uji coba tahun 2013, yakni sekitar 5,1 SR. Uji coba ini diikuti oleh serangkaian peluncuran nuklir yang diduga sebagai senjata balistik antar-benua pada 7 Februari 2016. Atas aksi provokatif ini, Korea Utara mendapatkan kritik internasional dan sanksi lebih lanjut dari PBB.

Korea Utara tidak berhenti untuk mengembangkan dan meluncurkan rudal-rudalnya karena selang waktu sembilan bulan kemudian, Korea Utara kembali menggelar uji coba nuklir yang kelima pada 9 September 2016. USGS melaporkan bahwa uji coba tersebut menyebabkan guncangan bermagnitudo 5,3. Tidak lama setelah itu, Korea Utara mengumumkan bahwa Pyongyang telah memiliki kemampuan untuk menghasilkan hulu ledak yang cukup kecil untuk masuk ke ujung rudal dan dapat membalas serangan apa pun. Hasil tes tersebut yang menunjukkan daya ledak sekitar 10 hingga 20 kiloton menarik kecaman internasional yang tajam. Meskipun Korea Utara mendapatkan banyak kecaman tajam dari dunia internasional, terutama Korea Selatan dan Amerika Serikat, namun Korea Utara diketahui terus menerus mengembangkan nuklir dan rudalnya hingga sekarang.

Serangkaian peluncuran rudal yang semakin aktif dilakukan Korea Utara

di awal tahun 2016, membuat Korea Selatan bersikap semakin waspada terhadap ancaman Korea Utara yang merupakan negara terdekatnya. Korea Selatan meyakini bahwa Kim Jong-Un telah berhasil memproduksi 40 kg plutonium yang dapat dibuat menjadi delapan senjata nuklir sejak tahun 2013. Hal ini terbukti dengan aktivitas uji coba nuklir yang terus menerus dilakukan Korea Utara. Untuk itu, Park Geun Hye mulai meningkatkan kesiapan kekuatan dan daya tempur militernya sebagai tanggapan atas provokasi Korea Utara. Peluncuran rudal di awal tahun 2016 oleh Korea Utara mendesak Korea Selatan untuk membuat strategi dan kebijakan yang lebih tegas demi melindungi negaranya dari ancaman serangan nuklir Korea Utara. Peningkatan pertahanan bagi Korea Selatan diperlukan sebagai jaminan rasa aman terhadap setiap aksi provokatif yang dilakukan Korea Utara.

Ambisi nuklir Korea Utara untuk menciptakan nuklir yang dapat menjangkau daratan Amerika Serikat tidak dapat dihentikan. Korea Utara mengumumkan uji coba rudal balistik yang terjadi bulan Agustus 2016 yang dipercaya sebagai rudal jarak jauh berbasis kapal selam. Tidak berhenti sampai di sana, Korea Utara terus melakukan pengembangan program nuklirnya hingga saat ini terbukti dari fasilitas nuklir Korea Utara yang terus beroperasi hingga saat ini. Hal ini terkait dengan upayanya dalam mewujudkan ambisi nuklirnya.

BAB 3. ALIANSI MILITER DAN PERTAHANAN KOREA SELATAN DAN AMERIKA SERIKAT

Bab ini akan menjelaskan mengenai aliansi keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat, mulai dari awal mula aliansi terbentuk hingga hubungan kedua negara saat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Amerika Serikat merupakan mitra penting bagi Korea Selatan sebagai penjamin keamanan negara dan begitu pula arti Korea Selatan bagi Amerika Serikat yang sangat penting bagi kepentingan nasionalnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan aliansi keduanya terbentuk untuk saling melindungi satu sama lain. Untuk menjelaskan bagaimana awal aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan terjadi, maka hal ini terkait dengan sejarah yang melibatkan kedua negara tersebut dalam sebuah konflik bersama Korea Utara yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

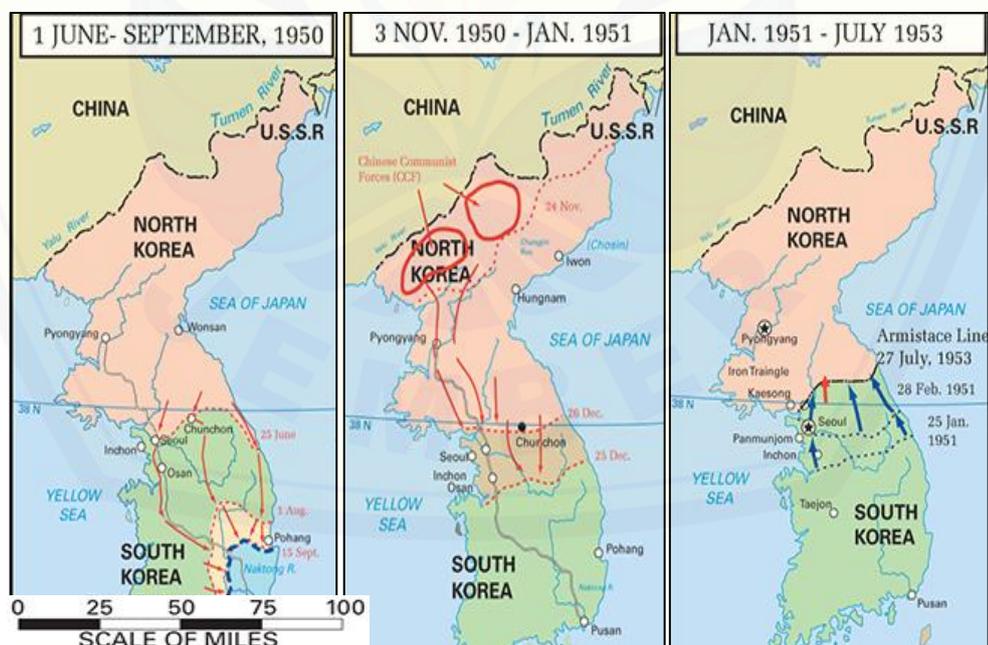
3.1 Sejarah Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat

Sejarah aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat tidak terlepas dari sejarah awal berdirinya negara Korea Selatan. Bangsa Korea berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1945 pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Namun pembebasan ini justru membawa sebuah tragedi baru, yakni terpecahnya Korea akibat perbedaan-perbedaan ideologis yang disebabkan oleh munculnya dua kekuatan besar di Semenanjung Korea. Bangsa Korea terbagi menjadi dua Semenanjung di mana pasukan Amerika Serikat menduduki bagian Selatan Semenanjung Korea dan pasukan Uni Soviet menduduki bagian Utara dengan garis perbatasan 38 derajat garis Lintang Utara (Sulistyo, 2012).

Tuntutan akan kemerdekaan yang pernah dijanjikan, masih terus ada meskipun Korea telah terpecah. Kemudian PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada tahun 1947 untuk mengadakan pemilihan umum antar Korea di bawah pengawasan PBB dengan tujuan untuk membentuk parlemen gabungan dari pemerintahan sementara (Widyasari, 2012). Akan tetapi, Korea Utara menolak

untuk mematuhi resolusi tersebut dan menolak adanya kegiatan Komisi PBB di bagian Utara. Hal ini disebabkan karena Korea Utara telah membangun struktur politik dan militer Komunis yang tangguh di bawah naungan Uni Soviet. Akibatnya, penyelenggaraan pemilihan umum di bawah pengawasan PBB hanya diadakan di Korea Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1948. Pemilihan umum ini melahirkan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Syngman Rhee yang berlandaskan sistem demokrasi dan kapitalisme pada tanggal 15 Agustus 1948 dengan ibu kotanya, Seoul (Widyasari, 2012). Republik Korea merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah saat itu di Semenanjung Korea.

Berdirinya Korea Selatan menjadi negara demokrasi yang sah, membuat Korea Utara dan Uni Soviet tidak dapat mengakuinya. Penolakan keras Korea Utara dan Uni Soviet terhadap berdirinya negara Republik Korea, membuat Korea Utara menyerang Korea Selatan dengan dukungan penuh Uni Soviet pada 25 Juni 1950. Pasukan gabungan Amerika-Korea Selatan berhasil mengimbangi kekuatan tentara Korea Utara dan dengan cepat dapat memukul mundur pasukan Korea Utara dari wilayah Korea Selatan.



Gambar 3.1 Peta Perang Korea dari tahun 1950 hingga 1953 yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu awal, pertengahan, dan akhir perang (Sumber: emerson kent, 2016)

Perang Korea akhirnya berakhir setelah ditandatanganinya perjanjian

gencatan senjata militer oleh Korea Utara pada 27 Juli 1953. Pasca Perang Korea, garis demarkasi antara Korea Utara dan Korea Selatan sedikit mengalami perubahan di mana garis tersebut semakin bergeser ke depan (ke arah Korea Utara) di akhir perang, tepatnya di Slanting. Garis ini berada di pantai barat lima belas mil di bawah timur laut paralel ke-38 hingga ke jangkar pantai timur empat puluh mil di atas garis paralel. Demarkasi tersebut berfungsi sebagai sedikit bentuk penyesuaian dari divisi sebelum perang. Selanjutnya baik Korea Utara maupun Korea Selatan, masing-masing menarik diri sejauh dua kilometer dari garis tersebut tiga hari pasca penandatanganan gencatan senjata guna membentuk zona demiliterisasi yang tidak boleh dilewati.

Dilihat dari pandangan historis tersebut, kepentingan Amerika Serikat di Semenanjung Korea adalah untuk mencegah penyebaran komunisme dari Uni Soviet dan China di Asia, terutama di Korea Selatan. Amerika Serikat melakukan berbagai upaya untuk mencegah ideologi keomunisme menguasai Korea Selatan dengan melibatkan diri dalam Perang Korea. Sementara, jika dilihat dari kepentingan global Amerika Serikat di Semenanjung Korea sejak tahun 1950-an hingga saat ini adalah untuk mempertahankan *status quo* di kawasan tersebut, dengan tetap menjalin hubungan pertahanan dengan Korea Selatan. Kesamaan ideologi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan pasca Perang Korea membuat hubungan antara keduanya masih berjalan baik. Ini juga yang menjadi alasan Amerika Serikat tetap memberikan bantuannya kepada Korea Selatan pasca Perang Korea (Widyasari, 2012).

3.2 Aliansi Militer dan Keamanan Amerika Serikat dan Korea Selatan Pasca Perang Korea

Kerjasama Korea Selatan dan Amerika Serikat berawal dari terpecahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara di mana Korea Selatan diberikan kepada Amerika Serikat dan Korea Utara diberikan kepada Uni Soviet di akhir Perang Dunia II. Pembagian atas Korea terjadi akibat persaingan ideologi antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dengan ideologi Liberalisme dan Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Dalam konflik ini, baik Amerika

Serikat dan Uni Soviet saling berusaha mengumpulkan negara-negara yang sepeham untuk membentuk aliansi dan menciptakan terjadinya politik memecah belah, seperti Jerman, Korea, Berlin, dan Indochina. Perebutan pengaruh oleh kedua negara adidaya ini terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia, khususnya di Semenanjung Korea yang dianggap sebagai wilayah strategis.

Puncak persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat terjadi pada 25 Juni 1950, di mana Korea Utara akhirnya melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan untuk menguasai seluruh semenanjung Korea. Untuk membendung kekuatan Korea Utara yang dibantu oleh Uni Soviet dan China, Korea Selatan meminta bantuan kepada Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengirimkan bala tentara Amerika Serikat untuk memimpin pasukan guna mengalahkan tentara Korea Utara. Hal ini menyebabkan terjadinya perang saudara di Korea Selatan selama tiga tahun yakni tahun 1950 hingga ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953.



Gambar 3.2 Penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Korea-Amerika yang diadakan di Universitas Kyungsang tahun 1953 (Sumber: Chosun News Press, 2017)

Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan *Mutual Defense Treaty* (Perjanjian Pertahanan Bersama) setelah berakhirnya perang Korea pada tahun 1953. Perjanjian ini mengharuskan personel militer Amerika Serikat untuk terus

menerus mempertahankan keberadaannya di Semenanjung Korea guna membantu Korea Selatan mempertahankan dirinya, terutama terhadap serangan dari Korea Utara. Hal ini dilakukan karena meskipun perang Korea telah berakhir tahun 1953, namun konflik antar negara dan sekutunya masih sering terjadi hingga saat ini. Perjanjian tersebut merupakan landasan dari aliansi militer dan pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat hingga saat ini. Perjanjian tersebut sangat penting, tidak hanya bagi kepentingan keamanan Korea Selatan namun juga kepentingan nasional Amerika Serikat. Isi perjanjian mengenai penembatan pasukan di Korea Selatan dimaksudkan Amerika Serikat untuk mencegah tersebarnya ideologi sosialis-komunis yang dibawa oleh China. Oleh karena itu, Korea Selatan menjadi mitra yang sangat penting bagi Amerika Serikat di Asia Timur. Tujuan lain dari aliansi keduanya adalah untuk membuat Korea Selatan menjadi cerminan dari pasar ekonomi yang sukses dan demokrasi liberal di Asia Timur (Gusfianda dan Indrawati, 2017).

Aliansi militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat memiliki kontribusi yang cukup besar bagi progresivitas perekonomian dan politik Korea Selatan hingga saat ini. Aliansi militer ini membantu keduanya untuk mempromosikan tujuan strategi bagi Semenanjung Korea dan penyatuan kembali wilayahnya. Aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan masih berfokus untuk menahan Korea Utara hingga abad ke-21, dan tantangan menjadi lebih luas mencakupi arena regional dan global untuk abad selanjutnya.

Latihan bersama pertama kali dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat pada tahun 1969 dengan nama *Focus Retina Exercise* di bawah komando *United Nations Command* (UNC). Akan tetapi, kapabilitas militer Korea Utara mengalami peningkatan pasca Perang Vietnam, sehingga turut berdampak pada stabilitas Semenanjung Korea. Maka dari itu, antisipasi juga dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan melakukan latihan bersama yang bernama *Team Spirit* (Marpaung, 2016). Amerika Serikat dan Korea Selatan kemudian membentuk Komando Pasukan Gabungan (CFC) pada 7 November 1978, yang berbasis di Seoul guna mencegah atau mengalahkan agresi luar terhadap Korea Selatan. CFC memiliki kendali operasional atas lebih dari 600.000 personel

militer aktif dari semua layanan, dari kedua negara dalam menjalankan misinya. CFC dipimpin oleh seorang jenderal Amerika Serikat, dengan seorang jenderal Angkatan Darat Korea Selatan sebagai wakil komandan. Semua komponen CFC secara taktis diintegrasikan melalui gabungan terus menerus dan perencanaan bersama, pelatihan dan latihan (Global Security, 2018).

Komando Pasukan Gabungan (CFC) berhasil bertahan selama beberapa dekade. Menurut Donald P. Gregg, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan, menyebutkan bahwa ancaman dari Korea Utara merupakan perekat yang menahan aliansi tersebut bersama-sama. Meskipun ada kesan kontrol Amerika total terhadap angkatan bersenjata Republik Korea melalui CFC, unit Korea adalah kekuatan independen. Kontrol tersebut berlaku hanya selama waktu perang di mana unit Korea akan tunduk pada CFC. Jika tidak ada perang, maka militer Korea Selatan beroperasi independen dari CFC di masa damai. Pada bulan April 1990, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan program untuk mengalihkan secara bertahap kehadiran militer Amerika Serikat di Korea Selatan ke peran yang lebih kecil. Peran militer Amerika Serikat beralih fungsi, lebih mendukung sebagai kondisi politik internasional dan memperkuat kemampuan pertahanan Korea Selatan yang diizinkan. Selain itu, kedua negara juga setuju untuk membubarkan Angkatan Darat Gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan dan untuk memisahkan Komando Komponen Darat dari Komando Pasukan Gabungan selama periode 1991 hingga 1993 (Global Security, 2018).

Aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan pernah mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Roh Moo Hyun di tahun 2002 akibat munculnya keinginan untuk bisa memiliki posisi sejajar dengan Amerika Serikat. Keadaan ini membuat semakin kerasnya sikap anti Amerika yang dilakukan masyarakat, terutama kaum muda Korea Selatan. Perlawanan keras yang ditawarkan Amerika Serikat kepada Korea Selatan dalam menghadapi krisis nuklir Korea Utara tidak sejalan dengan upaya perdamaian yang diinginkan pemerintah saat itu (Puimara, 2008). Akan tetapi, upaya diplomatik yang dilakukan Korea Selatan nyatanya tidak dapat mengatasi krisis nuklir Semenanjung Korea. Sebaliknya, sejak menarik diri dari perjanjian NPT (*Non-*

Proliferation Treaty) pada awal tahun 2003, Korea Utara semakin aktif dan terbuka dalam melakukan percobaan nuklir.

Kegagalan upaya diplomatik untuk membuat perdamaian di Semenanjung Korea mendorong hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat kembali erat. Pada tahun 2009, Amerika Serikat dan Korea Selatan kembali melakukan kerjasama, yaitu perjanjian *Proliferation Security Initiative* (PSI) yang bertujuan untuk menghentikan penyelundupan senjata pemusnah massal di seluruh negara di dunia sekaligus menahan gejolak keamanan di Semenanjung Korea. Selain Korea Selatan dan Amerika Serikat, perjanjian ini juga beranggotakan 10 negara lainnya, yaitu Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Inggris, Australia, dan Jepang. Kerjasama ini sangat berguna bagi Korea Selatan untuk mencegah kapal-kapal Korea Utara yang diduga membawa senjata pemusnah massal untuk masuk ke Semenanjung Korea. Selain itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat juga berupaya untuk menghentikan perdagangan senjata pemusnah massal yang diduga dilakukan Korea Utara sehingga diharapkan akan dapat menghentikan penyebaran nuklir di kawasan Asia Timur. Selain kerjasama PSI, Amerika Serikat dan Korea Selatan juga semakin mengembangkan aliansi ke arah aliansi regional dan global dengan penandatanganan pernyataan *Joint Vision for the Alliance* pada 16 Juni 2009. Perjanjian ini mengatur isu yang lebih banyak, diantaranya terorisme, poliferasi senjata pemusnah massal, pembajakan, kejahatan dan narkotik terorganisir, perubahan iklim, kemiskinan, keamanan energi, promosi HAM, pengembangan ekonomi, penyakit epidemi, stabilisasi situasi pasca konflik, dan pemeliharaan perdamaian.

Provokasi dari Korea Utara mendorong perencanaan kerjasama bilateral yang lebih terintegrasi di antara Korea Selatan dan Amerika Serikat guna menjawab segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Pada tahun 2011, aliansi ini kemudian memakai kebijakan *proactive deterrence* (pencegahan proaktif) untuk dapat merespon dengan cepat dan kuat terhadap provokasi Korea Utara lebih jauh. Korea Selatan dan Amerika Serikat meningkatkan latihan militer bersama untuk memperkuat kerjasama pertahanan mereka. Hal ini penting dilakukan mengingat peningkatan aktivitas nuklir yang semakin intens dilakukan Korea Utara. Latihan

militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat ini sebenarnya telah dilakukan sejak perjanjian *Combined Forces Command* (CFC) yang dipimpin Komandan Amerika Serikat. Kerjasama militer bilateral ini akan bertanggung jawab untuk perencanaan operasi militer, latihan militer, dukungan logistik, dan pertukaran inteligensi, serta membantu dalam operasi komunikasi, komando, pengawasan, dan sistem komputer.

Kerjasama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, tidak hanya melingkup aspek pertahanan saja, namun meluas ke dalam bidang ekonomi. Pengaruh China dan Jepang yang semakin kuat di Asia Timur membuat pertimbangan akan penyatuan kebijakan strategi dan ekonomi Amerika Serikat-Korea Selatan dalam berbagai aspek semakin meningkat. Hal ini yang memicu dilakukannya negosiasi *South Korea-U.S. Free Trade Agreement* (KORUS FTA). Perjanjian ini dirancang untuk mempromosikan aliran perdagangan bebas barang dan jasa antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Meskipun menimbulkan protes keras dari masyarakat Korea Selatan, khususnya para petani, tetapi perjanjian ini akhirnya diratifikasi oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2012. Selain untuk membantu Korea Selatan memperbaiki dampak parah yang ditimbulkan krisis ekonomi global 2008, perjanjian tersebut juga diharapkan akan mampu meningkatkan posisi Korea Selatan di tingkat internasional sebagai kekuatan tengah di Asia Timur. Selain itu, perjanjian ini juga akan memberikan keamanan pada Korea Selatan di mana dengan KORUS FTA dapat menekan Korea Utara dalam melakukan tindakan-tindakan yang mengancam dan membawa perdamaian di Semenanjung Korea (Ramadhan, 2014).

Amerika Serikat melihat bahwa perjanjian perdagangan bebas membawa dampak positif terhadap hubungan kedua negara, di samping meningkatkan angka-angka perdagangan negara. Sejak perjanjian tersebut, baik Amerika Serikat maupun Korea Selatan semakin kompak dalam melakukan kerjasama, terutama dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. Hal ini juga secara tidak langsung berdampak ada kepercayaan terhadap satu sama lain semakin meningkat. Kepercayaan diri Korea Selatan yang semakin meningkat dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara membuat terjadinya transfer alih komando militer dari

Amerika Serikat ke Korea Selatan. Hal ini dilakukan mulai tahun 2015 di mana komando militer yang sebelumnya dipegang oleh Amerika Serikat akan diambil alih oleh komando militer Korea Selatan sendiri seandainya terjadi perang. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa Amerika Serikat akan menarik tentaranya dari Semenanjung Korea, melainkan hanya pengalihan status pasukan Amerika Serikat, dari status pemegang komando menjadi status satuan pendukung.

Aliansi militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat semakin kuat dengan adanya pemasangan sistem pertahanan anti rudal THAAD milik Amerika Serikat di wilayah Korea Selatan. Negosiasi mengenai penempatan THAAD di Korea Selatan sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2014. Akan tetapi, Korea Selatan baru mulai memutuskan untuk menerima sistem pertahanan anti rudal THAAD ini pada Juli 2016. Sistem pertahanan anti rudal ini diharapkan akan melindungi Korea Selatan dari ancaman serangan rudal dari Korea Utara.

Sistem pertahanan anti rudal THAAD merupakan pencegat canggih yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik di fase akhir (*terminal phase*) dari pendekatan mereka ke target. Sistem THAAD dikembangkan oleh Lockheed Martin dan sejumlah perusahaan lain. Sistem pertahanan anti rudal THAAD bergantung pada pelacakan inframerah canggih untuk menghentikan target dan dampak energi kinetik yang dihasilkan untuk menghancurkan rudal musuh. Penghentian menggunakan energi kinetik meminimalkan risiko terhadap peledakan hulu ledak konvensional dan tidak akan memicu ledakan hulu ledak nuklir. Setiap rudal memiliki berat lebih dari 1.980 lbs dan panjangnya 20 kaki. Sistem ini memiliki jangkauan operasional sekitar 200 km dengan tinggi maksimum 150 km di atas permukaan bumi dan kecepatan rudal mencapai 8.24 Mach², atau 10.175 km per jam.

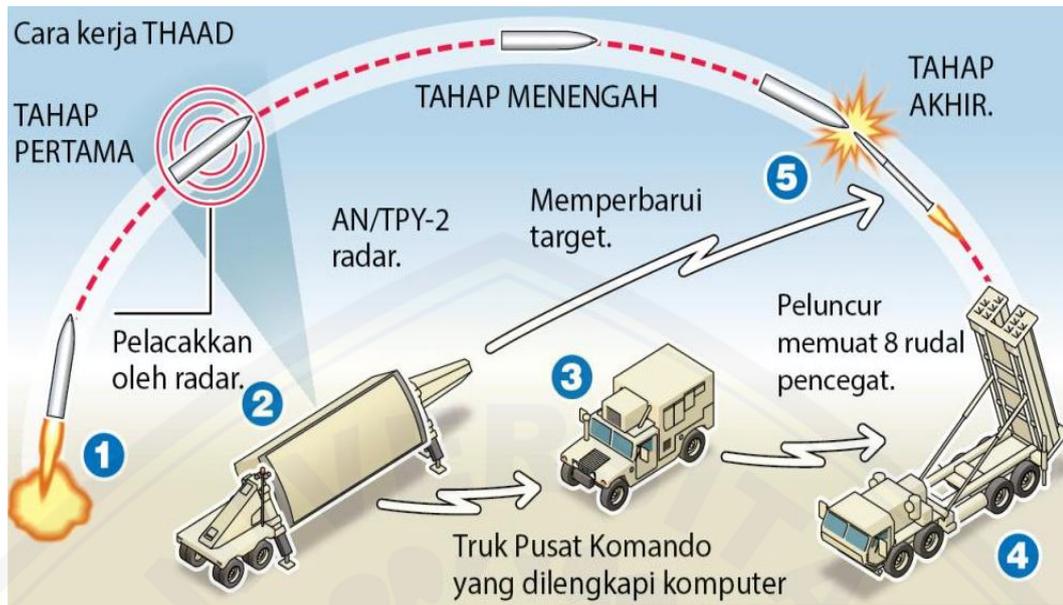
² Mach adalah pengukuran kecepatan kategori kecepatan suara atau hipersonik. Sebagai perbandingan, 1 Mach sama dengan 1225.04 kph (kilometer per jam).



Gambar 3.3 Sistem pertahanan rudal THAAD Amerika Serikat (Sumber: BBC Indonesia, 2017)

Baterai THAAD terdiri dari peluru kendali, peluncur, radar, segmen BM / C3I, dan peralatan pendukung darat. THAAD dirancang untuk melakukan misinya dalam mode kontrol terpusat, terdesentralisasi, atau otonom. Cara ini akan lebih menguntungkan karena adanya data ancaman dari sumber eksternal seperti sensor peringatan dini atau deteksi dan aset komunikasi.

Cara kerja sistem THAAD dimulai dengan radar antenna pemindai elektronik (AESA) dalam komponen THAAD mengaktifkan sistem setelah mendeteksi rudal sasaran. Radar mengirim data ke pusat komando untuk verifikasi ancaman manusia. Radar mengirim data penargetan ke pencegat, misil yang masuk dapat dicegat di dalam atau di luar atmosfer bumi pada jarak hingga 200 km. Rudal pencegat meluncur dari Kendaraan pembawa roket (KV) lalu menghancurkan rudal musuh dengan menggunakan energi kinetik yang dihasilkan. Rudal pencegat akan menabrak rudal musuh dan keduanya akan meledak di udara.



Gambar 3.4 Cara kerja sistem THAAD (Sumber:Wijanarko, 2017)

THAAD dikatakan sebagai pencegat canggih karena sistem ini mampu menghadang rudal balistik di atmosfer. Di samping itu dengan mobilitas dan penempatan baterai unit strategis, THAAD mampu mencegat dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek dan menengah selama fase akhir penerbangan. Hal ini menunjukkan THAAD dapat menembak jatuh rudal yang diluncurkan sebelum mendarat pada target. Meskipun Korea Selatan mulai mengembangkan rudal pencegat sendiri, KAMD pada pertengahan tahun 2020, namun THAAD dipilih diantara semua alternatif yang ada. Selain karena semakin tinggi tingkat kekhawatiran terhadap peningkatan potensi ancaman rudal dari Korea Utara, kecanggihan THAAD dinilai lebih dapat melindungi wilayah negara.

3.3 Tantangan Korea Utara terhadap Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat

Korea Utara merupakan negara yang paling dekat dengan Korea Selatan, baik secara wilayah maupun historis. Hal ini menjadikan kebijakan Korea Utara sebagai perhatian dan mempengaruhi politik luar negeri Korea Selatan. Perbedaan ideologi di antara keduanya merupakan salah satu alasan keberadaan sejumlah tentara Amerika Serikat di Korea Selatan. Strategi pembendungan terhadap

penyebaran komunisme yang dimainkan Amerika Serikat membuat negara ini selalu siaga terhadap sikap dan perubahan yang terjadi di Korea Utara. Amerika Serikat akan melakukan berbagai upaya dalam melindungi Korea Selatan sebagai mitranya dan demi tetap menjaga *status quo* di kawasan tersebut.

Perbedaan pendekatan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam menghadapi Korea Utara terjadi pada akhir 1990-an. Pencegahan terhadap Korea Utara yang merupakan pusat aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan mengalami perubahan besar ketika Kim Dae-Jung, Presiden Korea Selatan mengadopsi *sunshine policy* pada tahun 1998. Kebijakan ini merubah secara drastis kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara yang sebelumnya terkesan kaku dan keras, sehingga tidak dapat menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik yang ada. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan Utara terhadap Selatan tentang kesungguhannya dalam mengadakan pendekatan melalui kerjasama dan pertukaran kunjungan antara dua negara. Kebijakan ini berpengaruh terhadap hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Salah satu dampaknya adalah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan, sehingga diharapkan akan meningkatkan keamanan Semenanjung Korea dan meningkatkan pertahanan bersama.

Perubahan sikap dan opini Korea Selatan yang mulai mempengaruhi hubungannya dengan Amerika Serikat dalam menyikapi Korea Utara membawa perpecahan di dalam administrasi George Bush akibat perbedaan persepsi mengenai penyelesaian krisis nuklir Semenanjung Korea tahun 2002. Segera setelah menduduki jabatannya pada tahun 2001, Presiden Bush mengakhiri pembicaraan diplomatik dengan Korea Utara melihat pelanggaran perjanjian 1994 yang dilakukan Pyongyang. Bush menyatakan Korea Utara sebagai 'Poros Kejahatan' melihat program nuklirnya. Hal ini menjadikan Amerika Serikat lebih condong menggunakan cara-cara kekerasan dalam merespon Korea Utara, namun cara tersebut tidak mendapatkan dukungan dari sekutunya di kawasan tersebut, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Keduanya lebih menginginkan cara-cara yang lebih persuasif, dengan menjembatani terjadinya dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan pecahnya rezim Bush menjadi dua

kelompok yang berbeda dalam menghadapi krisis nuklir Semenanjung Korea (Puimara, 2008).

Perbedaan asumsi mengenai respon yang seharusnya diberikan kepada Korea Utara atas program nuklirnya membuat hubungan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat memburuk. Sikap agresif yang ditunjukkan oleh Bush tidak sejalan dengan pandangan Roh saat itu yang menganggap bahwa senjata-senjata Korea Utara tidak akan sanggup untuk mencapai Amerika Serikat, bahkan tidak terlalu menjadi ancaman bagi Seoul. Oleh karena itu, pendekatan garis keras yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat dikhawatirkan akan memancing respon agresif dari Korea Utara. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2008 ketika Presiden Lee menggantikan Presiden Roh memimpin Korea Selatan, di mana kebijakan yang diambil terhadap Korea Utara lebih keras dan menekankan pada denuklirisasi penuh Korea Utara. Perubahan kebijakan tersebut membuat hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat menjadi lebih dekat.

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan memburuk akibat beberapa fenomena yang muncul pasca dikeluarkannya kesepakatan *Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula*. Terbentuknya *UN Security Council Resolution* pada tahun 2009 mengakibatkan gencarnya peran kawasan luar negeri seperti Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Aksi Korea Selatan yang mengecam kondisi hak asasi manusia di Korea Utara mengakibatkan reaksi keras dari Pyongyang yang menyebut Seoul sebagai ‘pengkhianat’ dan ‘penjilat’ Amerika Serikat (Bajoria, Lee, & Zissis, 2011). Korea Utara kemudian melakukan uji coba rudal secara terang-terangan di sekitar laut Jepang, yang membuat semakin buruknya hubungan kedua negara ini.

Buruknya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara membuat aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat semakin erat. Otoritas komando masa perang yang pada Februari 2007 akan dialihkan ke Seoul, harus menunda transisi hingga tahun 2015 akibat kekhawatiran Korea Selatan atas provokasi Korea Utara. Amerika Serikat dan Korea Selatan mulai mempercepat langkah-langkah untuk mereformasi aliansi mereka dari tahun 2009, termasuk relokasi pasukan Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan meningkatkan kemampuan

pertahanan Korea Selatan (Manyin, Chanlett-Avery, dkk, 2016). Salah satu upaya peningkatan pertahanan keamanan Korea Selatan adalah bergabungnya Seoul ke dalam kegiatan *Proliferation Security Initiative* (PSI) pada 26 Mei 2009 yang diajukan oleh Amerika Serikat. Kegiatan PSI itu sendiri berupa VBSS atau *visit* (penyinggahan), *board* (pengamanan), *search* (pencarian), dan *seizure* (penyitaan). Kerjasama pertahanan keamanan dalam kerangka PSI yang dilakukannya Korea Selatan dan Amerika Serikat bertujuan untuk menjaga Semenanjung Korea dari kapal-kapal yang diduga mengangkut senjata pemusnah massal dan menghentikan perdagangannya. Hal ini diharapkan akan menghentikan penyebaran nuklir di kawasan tersebut dan dapat mengontrol laju pengembangan teknologi senjata nuklir Korea Utara.

Peristiwa ditenggelamkannya kapal Cheonan Korea Selatan oleh torpedo Korea Utara pada Maret 2010 dan penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong pada November 2010 membuat ketegangan antara Selatan dan Utara semakin meningkat. Sebagai tanggapan atas aksi tersebut, Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan latihan militer bersama dan Washington mengumumkan sanksi ekonomi tambahan dengan tujuan untuk memberikan tekanan lebih lanjut kepada rezim Pyongyang. Provokasi dari Korea Utara telah memperluas hubungan bilateral Amerika Serikat dan Korea Selatan dari tujuan utamanya, membela terhadap serangan Korea Utara, ke kemitraan regional dan bahkan global. Provokasi Korea Utara juga telah mendorong perencanaan bilateral yang lebih terintegrasi (Manyin, Chanlett-Avery, dkk, 2016).

Korea Selatan mengadopsi kebijakan *proactive deterrence* pada tahun 2011 sebagai bentuk respon yang cepat dan kuat atas provokasi Korea Utara lebih jauh. Kedua negara ini memperkuat aliansi pertahanan dan keamanan mereka dengan meningkatkan latihan militer bersama. Pemerintah Korea Selatan menunjukkan keinginan besar untuk menyetujui penggunaan kekuatan yang lebih besar terhadap Korea Utara sejak peristiwa penembakan Pulau Yeonpyeong tahun 2010. Presiden Lee meminta Amerika Serikat untuk melonggarkan pembatasan pada rudal balistik Korea Selatan dan aturan komandan garis depan agar lebih bebas dalam menanggapi serangan Korea Utara. Sedangkan pada masa

pemerintahan Presiden Park, kebijakan sedikit fleksibel dalam merespon serangan Korea Utara di mana dilakukannya dialog antarnegara untuk menumbuhkan kepercayaan antara Utara dan Selatan. Dalam hal ini, Presiden Obama secara terbuka mendukung kebijakan “trustpolitik” Presiden Park dan mendukung Seoul untuk memimpin dan menentukan cara terbaik dalam menangani Korea Utara (Manyin, Chanlett-Avery, dkk, 2016).

Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir yang ketiga pada Februari 2013 sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat untuk segera memindahkan senjata nuklir taktis di Korea Selatan dan membiarkan Korea Selatan untuk mengembangkan penangkal senjata nuklirnya sendiri. Hal ini membuat Presiden Obama menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk menjamin keamanan Korea Selatan dari ancaman nuklir Korea Utara. Presiden Park lantas mengumumkan pada Maret 2013 bahwa Korea Selatan akan menanggapi serangan Korea Utara dengan balasan yang lebih kuat dan nyata, tidak hanya sekedar provokasi semata. Ancaman ini dibuktikan dengan disiapkannya pasukan pengebom Amerika Serikat dalam latihan bersama di Korea Selatan untuk beres-beres dalam situasi yang buruk. Selain itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat juga setuju untuk menjalin kerjasama interoperabilitas pada 2 Oktober 2013. Di mana kerjasama ini membantu Korea Selatan menerima informasi yang diperlukan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak rudal Korea Utara melalui bantuan dari aset-aset milik Amerika Serikat (Permatasari, 2016).

Komitmen Amerika Serikat dalam melindungi Korea Selatan terhadap ancaman nuklir Korea Utara semakin tegas ditunjukkan. Sistem pertahanan anti rudal *Terminal High-Altitude Area Defense* (THAAD) yang merupakan bagian integral dari sistem *Ballistic Missile Defense* (BMD) mulai direncanakan untuk ditempatkan di Korea Selatan. Melalui kunjungan Komandan Pasukan Khusus Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) pada 3 Juni 2014, Jendral Curtis menyampaikan rencana tersebut kepada pemerintah Korea Selatan. Namun, rencana tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah Korea Selatan. Hal ini dikarenakan adanya keengganan Korea Selatan untuk mengiritasi hubungannya dengan China yang saat itu cukup baik. Penolakan Korea Selatan tidak

menjadikan hubungan keduanya memburuk. Korea Selatan dan Amerika Serikat kemudian kembali melakukan kerjasama Pakta Pertukaran Informasi tiga negara bersama Jepang pada 29 Desember 2014. Di mana pakta ini merupakan kerjasama intelijen untuk saling berbagi dan menjaga informasi mengenai program rudal dan nuklir Korea Utara.

Keenggan Korea Selatan menerima sistem pertahanan anti rudal THAAD milik Amerika Serikat, tidak menjadikan Korea Selatan melonggarkan pertahanan dan keamanan negaranya dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Korea Selatan justru berupaya mengembangkan sistem pertahanan misilnya sendiri yang disebut *Korea Air and Missile Defense (KAMD)*, untuk mencegah rudal masuk ke wilayah Korea Selatan. Sistem KAMD membentuk sistem fase terminal, sistem pertahanan misil tingkat lebih rendah yang dapat dicocokkan dengan lingkungan medan pertempuran Semenanjung Korea. KAMD terdiri dari sistem peringatan dini, komando dan sistem kontrol dan sistem pencegat (Global Security, 2017).

KAMD sendiri dapat dioperasikan dengan sistem aliansi dan secara bertahap menggabungkan peralatan BMD yang lebih canggih. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan menyebutkan bahwa untuk mengembangkan KAMD dan Kill Chain, salah satu sistem rudal, diperkirakan membutuhkan anggaran militer sebesar \$703 juta dalam 10 tahun mendatang. Meskipun Korea Selatan secara mandiri mengembangkan sistem pertahanan anti rudalnya sendiri, akan tetapi aliansi pertahanan dan kemanan dengan Amerika Serikat masih tetap berjalan. Aktivitas latihan bersama yang dilakukan kedua negara ini semakin intens dilakukan demi melindungi Korea Selatan dari serangan yang tidak bisa diprediksikan. Sejak tahun 2015, militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dilaporkan telah menyiapkan dan melakukan rencana perang baru untuk menyerang fasilitas senjata pemusnah massal Korea Utara dan persiapan untuk situasi darurat.

Provokasi dari Korea Utara telah mendorong perencanaan kontingensi bilateral antara Washington dan Seoul yang lebih terintegrasi. Kedua negara ini akhirnya mengadopsi kebijakan untuk merespon lebih cepat dan kuat dalam

menyerang dengan menggelar sistem pertahanan rudal Pertahanan Tinggi Altitude Area (THAAD) di Korea Selatan. Keputusan yang diumumkan pada Juli 2016 ini menimbulkan kontroversi yang datang, tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari beberapa negara, seperti China dan Rusia. Meskipun begitu, kebijakan ini tetap dilakukan sementara meyakinkan China bahwa sistem pertahanan anti rudal tersebut bukan ditujukan untuk dirinya. Penyebaran THAAD di Korea Selatan tetap berjalan meski terjadi pergantian rezim pemerintahan di Korea Selatan.

3.4 Kehadiran China dalam Hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat

China sejatinya memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Korea, yang dahulu merupakan satu kesatuan dari dinasti China. Hal ini terlihat dari budaya yang dimiliki Korea dan China yang masih berhubungan satu sama lain. Pendudukan Jepang membuat pada akhirnya Korea terpisah dari dinasti China dan berdiri sebagai negara mandiri. China juga memainkan peran dalam konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara di masa lalu. China membantu Korea Utara sebagai sesama komunis untuk menghadapi Korea Selatan saat Perang Korea, dan terus berlanjut menyokong negara Korea Utara untuk berkembang. China memiliki peran penting bagi Korea Utara dalam membantu negara tersebut dalam menghadapi krisis ekonomi dan memberikan beberapa bantuan pengembangan nuklir negara tersebut.

Posisi China sebagai negara pendukung bagi Korea Utara, sedikit demi sedikit mengalami perubahan dalam kebijakan luar negerinya di mana China mulai membuka diri ke dunia. Kenaikan ekonomi China menghasilkan orientasi baru pada pola perdagangan internasional negara-negara di kawasan Asia Timur, termasuk Korea Selatan. Di mana perubahan ini mempengaruhi hampir semua aspek kebijakan luar negeri dan ekonomi Korea Selatan. Sejak masuknya China ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001, China mulai menjadi salah satu mitra ekonomi penting bagi Korea Selatan.

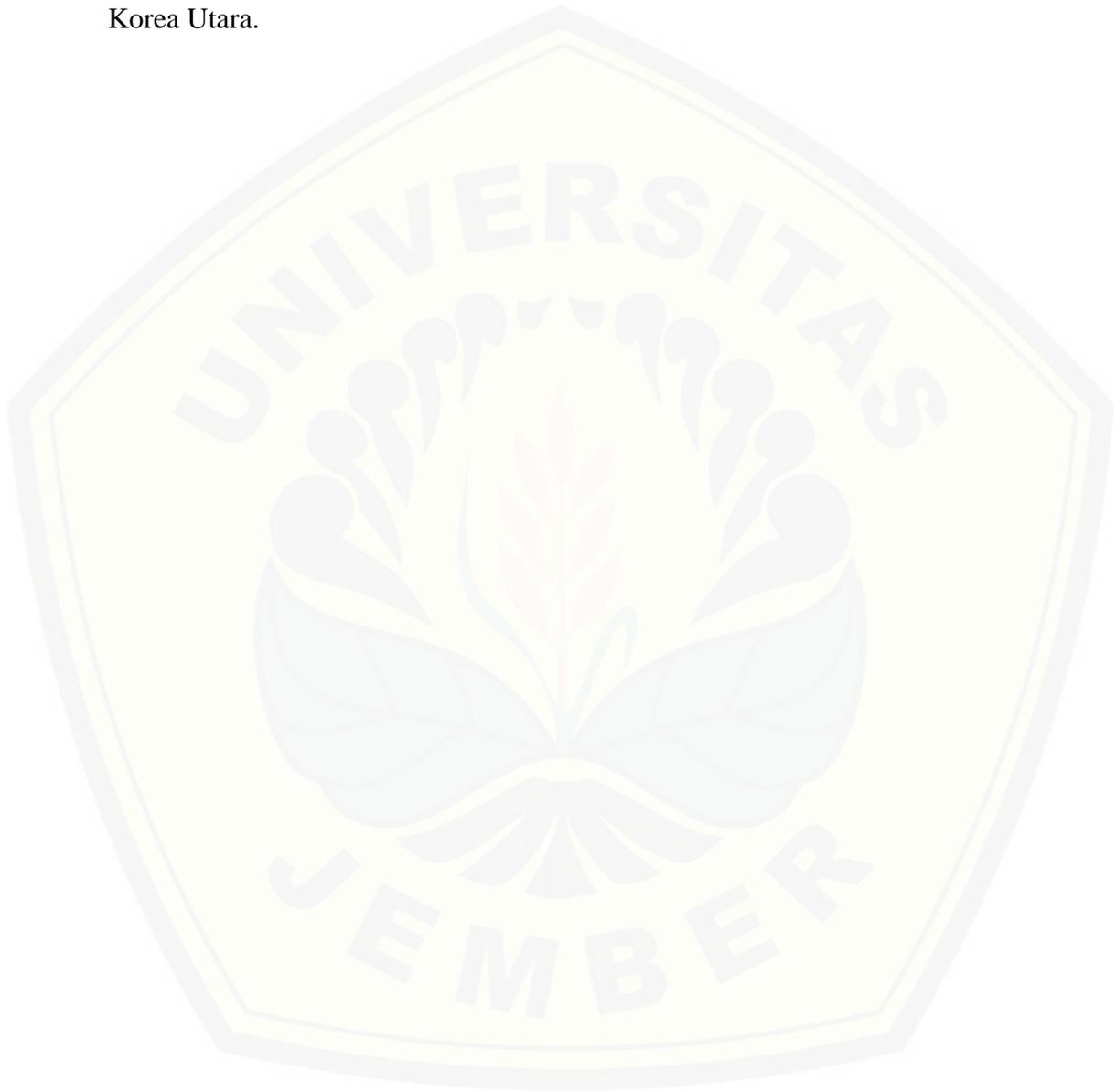
China mulai menggantikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama Korea Selatan, terlihat dari aktivitas ekspor-impor antara Korea Selatan dan China lebih tinggi daripada Korea Selatan dan Amerika Serikat pada tahun 2004. Hal ini

tentu merupakan perubahan yang sangat besar mengingat pada tahun 1995, aktivitas ekspor impor Korea Selatan–Amerika Serikat jauh lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan–China. Prioritas hubungan Korea Selatan dan China semakin meningkat akibat semakin tingginya kepentingan ekonomi dengan China. Situasi ini membuat Korea Selatan semakin berhati-hati dalam menerapkan kebijakannya terhadap Korea Utara dan Amerika Serikat agar tidak mengiritasi hubungannya dengan China.

Hubungan bilateral Korea Selatan dan China tidak menghentikan aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat di mana Amerika Serikat masih memiliki peran yang sangat penting bagi pertahanan dan keamanan Korea Selatan. Disisi lain, China memiliki kontribusi penting dalam konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Ketergantungan Korea Utara dengan China yang semakin meningkat pada tahun 2000-an membuat Korea Selatan mendesak China untuk mempertegas tindakan dan niat Beijing ke dalam kebijakannya terhadap Korea Utara (CRS, 2016). Protes terhadap uji coba nuklir yang sering dilakukan Korea Utara juga datang dari China yang menganggap bahwa tindakan Korea Utara hanya akan mengganggu kestabilan kawasan Asia Timur. Dukungan China terhadap denuklirisasi di Korea Utara dilakukan dengan berbagai upaya diplomasi dan menghindari keterlibatan militer. Hal ini tentu tidak sejalan dengan kebijakan keras yang sering kali diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Tindakan keras dan upaya militer dianggap China hanya akan lebih mengiritasi dan mengancam keamanan kawasan.

Perkembangan nuklir Korea Utara yang semakin meningkat di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, membuat Korea Selatan semakin khawatir dan merasa terancam. Janji China dalam mengupayakan denuklirisasi di Korea Utara tidak kunjung terealisasi. Kegagalan China dalam merealisasikan denuklirisasi di Korea Utara membuat Korea Selatan masih memerlukan Amerika Serikat untuk melindungi pertahanan dan keamanan wilayahnya. Korea Selatan masih sangat menghargai aliansinya dengan Amerika Serikat yang telah berlangsung selama 67 tahun. Selain itu, persaingan ekonomi dan politik antara China dan Amerika Serikat tentu membuat sulit posisi Korea Selatan. Di mana Amerika Serikat

sebagai mitra yang menjamin pertahanan dan keamanan negara, sedangkan China sebagai mitra ekonomi baru yang juga sangat penting. Hal ini membuat setiap kebijakan yang diambil Korea Selatan akan berpengaruh kepada hubungannya dengan Amerika Serikat maupun dengan China, khususnya kebijakan terhadap Korea Utara.



BAB 5. KESIMPULAN

Korea Selatan merupakan salah satu negara hasil perpecahan yang terjadi di Semenanjung Korea akibat liberalisasi dan pendudukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Isu reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara berubah menjadi konflik yang berkepanjangan. Korea Utara diketahui mengembangkan program nuklir sejak tahun 1960-an yang diklaim sebagai perlindungan terhadap ancaman nuklir Amerika Serikat. Pemasangan sistem pertahanan rudal THAAD Amerika Serikat di Korea Selatan dikarenakan terjadinya dilema keamanan di Semenanjung Korea dan adanya aliansi dengan Amerika Serikat.

Perkembangan rudal dan nuklir Korea Utara yang tidak terkontrol menyebabkan terjadinya dilema keamanan di Semenanjung Korea. Di mana peningkatan kapabilitas rudal dan nuklir Korea Utara telah menurunkan keamanan Korea Selatan. Situasi yang terjadi di Semenanjung Korea telah memenuhi empat kriteria yang menunjukkan dilema keamanan, yaitu menurunkan keamanan pihak lain, menurunkan keamanan semua pihak, ketidakpastian tujuan, dan tidak adanya kebijakan yang cocok.

Rudal Korea Utara yang semakin mengalami peningkatan, baik dari jumlah rudal yang diluncurkan, besarnya jangkauan yang dicapai, hingga kekuatan daya ledak nuklir yang dibawa, membuat rasa khawatir Korea Selatan terhadap ancaman rudal dan nuklir Korea Utara semakin meningkat. Rasa khawatir yang semakin tinggi mendorong Korea Selatan untuk bersikap semakin waspada terhadap ancaman serangan nuklir dan rudal Korea Utara. Ketidakpastian tujuan dari program nuklir Korea Utara, menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan semua pihak. Semua aksi dan pernyataan provokatif yang dilakukan Korea Utara mendesak Korea Selatan untuk melakukan upaya lain untuk lebih meningkatkan pertahanan keamanan negaranya dari segala potensi ancaman dari Korea Utara. Situasi ini mendorong Korea Selatan untuk mencari perlindungan yang mampu melindungi wilayahnya terhadap peningkatan ancaman nuklir Korea Utara. Untuk itu, aliansi dilakukan dengan Amerika Serikat guna memenuhi fungsi, salah satunya adalah fungsi *augmentive*, yaitu fungsi untuk menambahkan

kekuatan Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh keberadaan pasukan militer Amerika Serikat di Korea Selatan yang membantu Korea Selatan dalam melindungi pertahanan dan keamanan negara. Fungsi aliansi ini juga digunakan dalam pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan. Sistem THAAD memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan KAMD, sehingga akan dapat menandingi kemampuan rudal dan nuklir Korea Utara yang semakin meningkat.

Sistem pertahanan anti rudal THAAD merupakan pencegat canggih yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik pendek, menengah, maupun jauh. Sistem pertahanan anti rudal THAAD tidak membawa hulu ledak tetapi bergantung pada pelacakan inframerah canggih untuk menghentikan target dan dampak energi kinetik yang dihasilkan digunakan untuk menghancurkan rudal inbound. Setiap rudal memiliki berat lebih dari 1.980 lbs dan panjangnya 20 kaki. Sistem ini memiliki jangkauan operasional sekitar 200 km dan kecepatan rudal pada Mach 8.24, atau sedikit lebih dari 6.260 mph, ke targetnya. Sistem ini dilengkapi dengan radar yang memiliki jangkauan sejauh 1.000 km dan daya tembak yang tinggi hingga 72 interceptor per baterai. Dengan kemampuannya yang hebat, sistem THAAD dapat menutup celah *battlespace* antara PAC-3 yang hanya menjangkau lapisan dalam atmosfer dan BMD Aegis yang hanya menjangkau lapisan luar atmosfer. Untuk itu, sistem ini dipilih sebagai pertahanan rudal yang paling tepat untuk menandingi peningkatan rudal dan nuklir Korea Utara.

Pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan dimulai pada tanggal 7 Maret 2017 oleh Amerika Serikat. Pemasangan tersebut dilakukan sehari setelah peluncuran empat rudal yang dilakukan oleh Korea Utara yang merupakan pelanggaran sanksi internasional (BBC news, 2017). Sementara itu, Laksamana Herry Harris bahwa Amerika Serikat menghormati komitmen aliansi dengan Korea Selatan dan siap mempertahankan diri, tanah air Amerika, dan sekutunya meskipun kesepakatan pemasangan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Presiden Obama.

Pemasangan sistem pertahanan anti rudal THAAD di Korea Selatan

menimbulkan banyak kontroversi meskipun sistem ini memiliki kecanggihan teknologi yang sangat baik. Sejak rencana pemasangan sistem THAAD ini muncul, China dan Rusia telah memperingatkan Korea Selatan untuk tidak menggunakan sistem THAAD. Hal ini dikarenakan kekhawatiran Beijing dan Moskow terhadap sistem THAAD yang akan menimbulkan risiko bagi keamanan keduanya dan juga akan berkontribusi terhadap ketidakstabilan regional (Kim, 2016). Ancaman China ini pun dibuktikan dengan sejumlah sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Korea Selatan setelah adanya kesepakatan pemasangan sistem THAAD ini, diantaranya larangan perjalanan ke Korea Selatan, penutupan sejumlah toko Korea Selatan di China, penghentian produk dan hiburan dari Korea Selatan, dan lain sebagainya.

Penolakan terhadap pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan juga datang dari masyarakat setempat yang khawatir akan efek pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh sistem THAAD tersebut. Selain itu, timbulnya kecemasan mengenai serangan rudal Korea Utara yang akan membidik tempat tinggal mereka sebab dekat dengan lokasi tempat pemasangan sistem THAAD. Selain itu, sistem THAAD dinilai hanya akan membuat semakin rumitnya dilema keamanan di Semenanjung Korea. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep *regional security*. Meski demikian, beratnya ancaman rudal dan nuklir Korea Utara yang semakin besar memaksa Korea Selatan untuk menerima sistem THAAD Amerika Serikat demi melindungi dirinya dan menjaga aliansi dengan Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Davis, M. Jane. 1996. *Security Issues in The Post-Cold War World*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Djiwandono, Patrisius Istiarto. 2015. *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Haryati, Sri dan Ahmad Yani. 2007. *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. Ilmu hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES
- Nazir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramadhan, Mega Shandy Gema. 2014. Kebijakan Korea Selatan Meratifikasi Korus Free Trade Agreement Tahun 2012. *Skripsi*. Jember: Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Buku dan Dokumen Eletronik

- Buzan, Barry. 2007. An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era, Second Edition: *People, States, and Fear*. The ECPR Press: Colchester.
- Broto Wardoyo. 2015. *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*. Klaten Utara: Nugra Media.
- Cordesman, Anthony H. dan Charles Ayers. 2017. *The Military Balance in the Koreas and Northeast Asia*. Final Web Book Edition: January 2017. A Report of the CSIS Burke Chair in Strategy.
- Manyin, Mark E., Emma Chanlett-Avery, dkk. 2017. U.S. – South Korea Relations. *Congressional Research Service*. 4 Agustus 2017. *Congressional Research Service*: 3,8,9.

United States. 1957. *American foreign policy. 1950-1955; basic documents. Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea*. Washington: U. S. Govt. Print. Off.

United States. 2009. *Center for U.S.-Korea Policy. Joint Vision for The Alliance of The United States of America and The Republic of Korea*. Washington: White House Press Release.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis:

Aldikawati, Mega. 2015. Masa Depan Reunifikasi Korea (Dinamika Hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin. *Jurnal Polinter*. 1(1): 40-41.

Fedder, Edwin H. 1968. The Concept of Alliance. *International Studies Quarterly*. 12(1): 67.

Gusfianda, Bobi dan Indrawati. 2017. Aliansi Militer dan Keamanan Amerika Serikat-Korea Selatan Pasca Perang Dingin dan Pengaruhnya di Kawasan Asia Timur. *Global Insight Journal*. 2(1): 184-185.

Isna, Hartati. 2013. Implementasi Kerjasama Pertahanan Keamanan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Kerangka Proliferation Security Initiative (PSI) 2009. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. 1(2): 232.

Jr., Joseph S. Bermudez. 1999. *A History of Ballistic Missile Development in the DPRK*. Dalam A History of Ballistic Missile Development in the DPRK. Jeffrey W. Knopf. California: Center for Nonproliferation Studies.

Klinger, Bruce. 2015. The Importance of THAAD Missile Defense. *The Journal of East Asian Affairs*. 29(2): 28-30.

Lee, Seok-Soo. 2015. International Dimensions of National (In)Security Concepts, Challenges and Ways Forward. *9th Berlin Conference on Asian Security (BCAS)*. 14-16 Juni 2015. *Research Institute for National Security Affairs*: 3-5

Marpaung, Edward Giovanny. 2017. Aliansi Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea (2010-2016). *Skripsi*. Bandung: Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

Nidia, Dhita Novebrin. 2015. Sunshine Policy pada Masa Pemerintahan Presiden Lee Myung Bak. *Jurnal HI*. Hal: 1-4.

Permatasari, Dewi. 2016. Penolakan Korea Selatan Untuk Bergabung ke dalam Sistem Pertahanan Rudal Amerika Serikat di Asia Timur. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. 4(1): 81-85.

- Puimara, Leonardo Ernesto. 2008. Kebijakan Korea Selatan terhadap Krisis Nuklir Semenanjung Korea. *Tesis*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Sulistyo, Angel Fransis. 2012. Uji Coba Nuklir 2006 sebagai Upaya Survival Korea Utara. *Skripsi*. Jember: Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Thalib, Haikal Hasan. 2015. Kebijakan Pertahanan Keamanan Korea Selatan dalam Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara antara Tahun 2002-2012. *Jurnal Hubungan Internasional (SI)*. 1(3): 2-4.
- Wicahyani, Alfina Farmaritia. 2010. Dampak Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur. *Tesis*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Widyasari, Lilis. 2012. Dinamika Hubungan Korea Selatan-Korea Utara dalam Mewujudkan Reunifikasi di Semenanjung Korea Periode 2003-2008. *Skripsi*. Jakarta: Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Publikasi Internet:

- Al Jazeera News. 2018. North Korea's nuclear weapons: What we know. <https://www.aljazeera.com/news/2017/05/north-korea-testing-nuclear-weapons-170504072226461.html>. [Diakses pada 27 Juli 2018].
- Afrisia, Rizky Sekar. 2017. Korut Dikhawatirkan Tandai Hari Jadi 9 September dengan Rudal. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170909103914-113-240563/korut-dikhawatirkan-tandai-hari-jadi-9-september-dengan-rudal>. [Diakses pada 25 Maret 2018].
- Arirang News. 2016. THAAD Deployment in South Korea, a New Paradigm for Korean Defense System. <https://www.youtube.com/watch?v=AQXCHWol-yM&t=3s>. [Diakses pada 21 Juni 2017].
- Bajoria, Jayshree, Youkyung Lee, dan Carin Zissis. 2011. The U.S.-South Korea Alliance. <https://www.cfr.org/backgrounder/us-south-korea-alliance>. [Diakses pada 14 Mei 2017].
- Batsakis, Anthea dan Herald Sun. 2017. North Korea Nuclear Weapons Facts: What is Kim Jong Un Capable of?. <https://www.heraldsun.com.au/news/world/north-korea-nuclear-weapons-facts-what-is-kim-jong-un-capable-of/news-story/9ffcaf27e513004c651853bec3c36707>. [Diakses pada 21 Desember

2017].

BBC Indonesia. 2012. Tiga Maskapai Ubah Jalur Hindari Roket Korea Utara. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/04/120410_airlinesnorthkore. [Diakses pada 27 Desember 2017].

_____. 2017. AS Mulai Pasang Sistem Pertahanan Rudal THAAD di Korea. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39189535>. [Diakses pada 27 Maret 2017].

_____. 2017. Korea Utara Luncurkan Rudal Melintasi Angkasa Jepang, Indonesia Mengecam. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41077034>. [Diakses pada 21 Juli 2018].

BBC News. 2010. North Korean Artillery Hits South Korean Island. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11818005>. [Diakses pada 24 April 2018].

_____. 2018. North Korea's Missile and Nuclear Programme. <https://www.bbc.com/news/world-asia-41174689>. [Diakses pada 21 September 2018].

Bergmann, Christina. 2013. AS dan Korea Selatan Tegaskan Aliansi. <https://www.dw.com/id/as-dan-korea-selatan-tegaskan-alianasi/a-16801498>. [Diakses pada 14 Mei 2017].

Berlianto. 2016. Sejarah Nuklir Korut, dari Pembangkit Listrik Menjadi Senjata. <https://international.sindonews.com/read/1138254/41/sejarah-nuklir-korut-dari-pembangkit-listrik-menjadi-senjata-1473474477>. [Diakses pada 25 Maret 2017].

Central Intelligence Agency. 2018. East & Southeast Asia: Korea, South. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html>. [Diakses pada 19 Desember 2017].

Chosun News Press. 2017. Rhee's high diplomacy "Eisenhower, Stalin and Mao Zedong were afraid of Syngman Rhee": Moon Jae-in President's Era - Learn from previous presidents (1). <http://pub.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1003&nNewsNumb=20170524762&nidx=24763>. [Diakses pada 18 Juli 2017].

CSIS. 2018. Missiles of North Korea. <https://missilethreat.csis.org/country/dprk/>. [Diakses pada 18 Juli 2018].

DW. 2017. Korut Ancam Lakukan Ujicoba Nuklir "Setiap Pekan". <https://www.dw.com/id/korut-ancam-lakukan-ujicoba-nuklir-setiap-pekan/a-38459469>. [Diakses pada 24 April 2018].

- Emerson Kent. 2016. History Map of The Korean War: Principal Campaigns of The Korean War. http://www.emersonkent.com/map_archive/korean_war.htm. [Diakses pada 24 April 2017].
- Ferida, Khairisa. 2017. 200 Orang Tewas di Lokasi Uji Coba Senjata Nuklir Korut?. <https://www.liputan6.com/global/read/3147262/200-orang-tewas-di-lokasi-uji-coba-senjata-nuklir-korut>. [Diakses pada 21 September 2017].
- Gabrillin, Abba. 2017. Indonesia Kecam Uji Coba Rudal Korea Utara. <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/29/10521401/indonesia-kecam-uji-coba-rudal-korea-utara>. [Diakses pada 30 Oktober 2018].
- Global Security. 2011. Chapter 4: Theater High Altitude Area Defense System. <https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-01-11/ch4.htm>. [Diakses pada 27 Maret 2017].
- _____. 2017. Korea Air and Missile Defense (KAMD). <https://www.globalsecurity.org/military/world/rok/kamd.htm>. [Diakses pada 24 Maret 2018].
- _____. 2018. U.S. Forces, Korea/Combined Forces Command Combined Ground Component Command (GCC). <https://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/usfk.htm>. [Diakses pada 14 Mei 2018].
- Griffiths, James, dan Joshua Berlinger. 2016. What is THAAD?. <https://edition.cnn.com/2016/07/13/asia/what-is-thaad/>. [Diakses pada 11 Maret 2017].
- IAPD Forum. 2016. Korea Selatan dan A.S. menyetujui pengurangan pertahanan anti rudal. <http://apdf-magazine.com/id/korea-selatan-dan-a-s-menyepakati-pengurangan-pertahanan-anti-rudal/>. [Diakses pada 18 Desember 2016].
- Jo, Min Hee. 2018. South Korea's Tough Choice on THAAD. <https://nationalinterest.org/feature/south-koreas-tough-choice-thaad-26132>. [Diakses pada 21 September 2018].
- KBS World Radio. 2011. Hasil Pembicaraan Menlu Korea Selatan dan Menlu Amerika Serikat. http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=21960. [Diakses pada 23 Mei 2017].
- _____. 2016. Kemampuan Misil. <http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/nucleus/missile.htm?lang=i>. [Diakses pada 25 Maret 2017].

- _____. 2016. Tahun 1950 hingga 60-an.
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/outline/outline_1950.htm?lang=i. [Diakses pada 25 Maret 2017].
- Kim, Sarah. 2016. Washington Will Deploy THAAD to Korea.
<http://www.worldaffairsjournal.org/content/washington-will-deploy-thaad-missile-defense-south-korea>. [Diakses pada 21 Juni 2017].
- Kompas. 2016. Pasukan Khusus Korut Berlatih Serbu Kantor Presiden Korsel.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/13/08583221/pasukan.khusus.korut.berlatih.serbu.kantor.president.korsel>. [Diakses pada 19 Desember 2017].
- Koten, Thomas. 2018. Inilah Gempa Bumi Besar yang Pernah Terjadi di Indonesia.
<http://www.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/124932/inilah.gempa.bumi.besar.yang.pernah.terj>. [Diakses pada 24 Maret 2018].
- Liputan6. 2012. Korut Menampik Rencana Uji Coba Nuklir.
<https://www.liputan6.com/global/read/385887/korut-menampik-rencana-uji-coba-nuklir>. [Diakses pada 24 April 2018].
- Malau, Srihandriatmo. 2017. Sistem Anti rudal THAAD Sekarang Beroperasi di Korea Selatan.
<http://www.tribunnews.com/internasional/2017/05/02/sistem-anti-rudal-thaad-sekarang-beroperasi-di-korea-selatan>. [Diakses pada 24 Juni 2017].
- Maulana, Victor. 2017. Korut Klaim Sukses Uji Coba Bom Hidrogen.
<https://international.sindonews.com/read/1236214/40/korut-klaim-sukses-uji-coba-bom-hidrogen-1504430973>. [Diakses pada 21 Juni 2017].
- Meuko, Nurlis E. 2017. Hadapi Rudal Korea Utara, Amerika Tempatkan THAAD di Korsel.
<http://batamnews.co.id/berita-22293-bantu-amerika-di-semenanjung-korea-jepang-kirim-kapal-terbesarnya.html>. [Diakses pada 24 Juni 2017].
- Mohamad, Ardyan. 2016. 5 Fakta Mengerikan Ancaman Bom Nuklir Korut bagi Dunia.
<https://www.merdeka.com/dunia/5-fakta-mengerikan-ancaman-bom-nuklir-korut-bagi-dunia/korut-mengoplos-bom-atom-dan-bom-hidrogen.html>. [Diakses pada 14 Mei 2017].
- Muhaimin. 2015. Korsel Percaya Rezim Kim Jong-un Bisa Buat 8 Senjata Nuklir.
<https://international.sindonews.com/read/1072254/40/korsel-percaya-rezim-kim-jong-un-bisa-buat-8-senjata-nuklir-1451039902>. [Diakses pada 23 Mei 2017].
- Nikitin, Mary Beth D. 2016. North Korea's January 6, 2016, Nuclear Test.
<https://fas.org/sgp/crs/nuke/IN10428.pdf>. [Diakses pada 14 Mei 2017].

- NTI. 2011. Atomic Energy Research Institute. <https://www.nti.org/learn/facilities/776/>. [Diakses pada 19 Desember 2017].
- Nuclear Threat Initiative. 2018. North Korea. <https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/>. [Diakses pada 24 Agustus 2018].
- Nursalikhah, Ani. 2017. China Tegaskan Penolakannya Terhadap THAAD di Korsel. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/05/03/opcqqg366-cina-tegaskan-penolakannya-terhadap-thaad-di-korsel>. [Diakses pada 2 Juni 2017].
- Radja, Aditia Maruli. 2017. THAAD, Sistem Rudal Anti rudal AS Penyebab China Meradang. <https://www.antaranews.com/berita/626255/thaad-sistem-rudal-anti-rudal-as-penyebab-china-meradang>. [Diakses pada 21 Juni 2017].
- Redaksi Republika. 2016. Cina Minta AS Jaga Stabilitas Wilayah. <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/02/16/o2mgg922-cina-minta-as-jaga-stabilitas-wilayah>. [Diakses pada 24 Maret 2017].
- Rose, Frank A. 2018. As Russia and China Improve Their Conventional Military Capabilities, Should The US Rethink Its Assumptions on Extended Nuclear Deterrence?. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/10/23/as-russia-and-china-improve-their-conventional-military-capabilities-should-the-us-rethink-its-assumptions-on-extended-nuclear-deterrence/>. [Diakses pada 30 Oktober 2018].
- Sang-Hun, Choe. 2012. North Korea Threatens South With Military Action. <https://www.nytimes.com/2012/04/24/world/asia/north-korea-threatens-seoul-with-military-action.html>. [Diakses pada 24 April 2018].
- Saputra, Rendra, Mitra Angelia, dan Lazuardhi Utama. 2016. Roket Korea Utara Bikin Panik Amerika. <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/733290-roket-korea-utara-bikin-panik-amerika>. [Diakses pada 27 Maret 2017].
- Sauter, Dan, dan Harry J. Kazianis. 2014. THAAD: America's Super Shield Against Ballistic Missiles?. <https://nationalinterest.org/feature/thaad-americas-super-shield-against-ballistic-missiles-11701?page=0%2C1>. [Diakses pada 30 Oktober 2018].
- Sulaiman, Achmad. 2017. Begini Canggihnya Sistem Pertahanan THAAD. <https://nusantaranews.co/begini-canggihnya-sistem-pertahanan-thaad/>. [Diakses pada 27 Maret 2017].
- Sung-ki, Jung. 2009. South Korea Negative on Joining US Missile Shield.

http://m.koreatimes.co.kr/phone/news/view.jsp?req_newsidx=52311.
[Diakses pada 24 September 2017].

Syah, Efran. 2015. Sistem Rudal Pertahanan Udara THAAD Amerika Serikat. <https://www.artileri.org/2015/01/sistem-rudal-pertahanan-udara-thaad.html>. [Diakses pada 27 Maret 2017].

Tamaim, Imam. 2017. Ini Dia, Program Nuklir Korea Utara yang Ditakuti Amerika. <https://nusantara.news/ini-dia-program-nuklir-korea-utara-yang-ditakuti-amerika/>. [Diakses pada 27 Juli 2018].

Tempo. 2013. AS Tegaskan Dukungan pada Korsel Tak Tergoyahkan. <https://dunia.tempo.co/read/469855/as-tegaskan-dukungan-pada-korsel-tak-tergoyahkan/full&view=ok>. [Diakses pada 27 Maret 2017].

Tempo.co. 2017. Berbagai Sanksi PBB Untuk Korea Utara dalam 11 Tahun. <https://dunia.tempo.co/read/910196/berbagai-sanksi-pbb-untuk-korea-utara-dalam-11-tahun>. [Diakses pada 27 Desember 2017].

Brookings. 2003. The Korean Peninsula Security Crisis and U.S.-ROK Economic Relations. <https://www.brookings.edu/research/the-korean-peninsula-security-crisis-and-u-s-rok-economic-relations/>. [Diakses pada 14 Mei 2017].

Tuwo, Andreas Gerry. 2017. Indonesia Dikelilingi 4 Negara Pemilik Senjata Nuklir, Apa Saja?. <https://m.liputan6.com/global/read/2956593/indonesia-dikelilingi-4-negara-pemilik-senjata-nuklir-apa-saja#>. [Diakses pada 30 Desember 2017].

UCS. 2017. Here's Every Nuclear Weapon in The US Arsenal. <https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/us-nuclear-arsenal>. [Diakses pada 30 Oktober 2018].

UPSeis. Earthquake Magnitude Scale, Earthquake Magnitude Classes. <http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/magnitude.html>. [Diakses pada 21 Februari 2018].

VOA Indonesia. 2017. Korea Selatan Mulai Pangkalkan Sistem Anti Misil. <https://www.voaindonesia.com/a/korea-selatan-mulai-pangkalkan-sistem-anti-misil/3826005.html>. [Diakses pada 24 Juni 2017].

Wijanarko, Yusuf. 2017. Tiongkok Desak Penarikan THAAD dari Korea Selatan. <http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/04/27/tiongkok-desak-penarikan-thaad-dari-korea-selatan-399962>. [Diakses pada 24 Juni 2017].

Yasinta, Veronika. 2018. Mengenal Punggye-ri, Situs Uji Coba Nuklir Korea Utara yang Misterius. <https://internasional.kompas.com/read/2018/04/29/19593141/mengenal>

punggye-ri-situs-uji-coba-nuklir-korea-utara-yang-misterius. [Diakses pada 24 Juni 2018].

Yonhap, Ardito Ramadhan, dan Natalia. 2016. Korea Selatan dan AS Sepakat Bangun Sistem Pertahanan Rudal. <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/08/118786282/korea-selatan-dan-as-sepakat-bangun-sistem-pertahanan-rudal>. [Diakses pada 18 Desember 2016].



Lampiran 1

***Mutual Defense Treaty Between the United States
and the Republic of Korea***

23. TEXT OF TREATY, OCTOBER 1, 1953¹

The Parties to this Treaty,

Reaffirming their desire to live in peace with all peoples and all governments, and desiring to strengthen the fabric of peace in the Pacific area,

Desiring to declare publicly and formally their common determination to defend themselves against external armed attack so that no potential aggressor could be under the illusion that either of them stands alone in the Pacific area,

Desiring further to strengthen their efforts for collective defense for the preservation of peace and security pending the development of a more comprehensive and effective system of regional security in the Pacific area,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The Parties undertake to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, or obligations assumed by any Party toward the United Nations.

ARTICLE II

The Parties will consult together whenever, in the opinion of either of them, the political independence or security of either of the Parties is threatened by external armed attack. Separately and jointly, by self help and mutual aid, the Parties will maintain and develop appropriate means to deter armed attack and will take suitable measures in consultation and agreement to implement this Treaty and to further its purposes.

ARTICLE III

Each Party recognizes that an armed attack in the Pacific area on either of the Parties in territories now under their respective administrative control, or hereafter recognized by one of the Parties as lawfully brought under the administrative control of the other, would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional processes.

¹ TIAS 3097; 5 UST 2368-2376. Ratification advised by the Senate Jan. 26, 1954, and ratified by the President Feb. 5, 1954, subject to an understanding; entered into force Nov. 17, 1954.

ARTICLE IV

The Republic of Korea grants, and the United States of America accepts, the right to dispose United States land, air and sea forces in and about the territory of the Republic of Korea as determined by mutual agreement.

ARTICLE V

This Treaty shall be ratified by the United States of America and the Republic of Korea in accordance with their respective constitutional processes and will come into force when instruments of ratification thereof have been exchanged by them at Washington.¹

ARTICLE VI

This Treaty shall remain in force indefinitely. Either Party may terminate it one year after notice has been given to the other Party.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Washington, in the English and Korean languages, this first day of October 1953.

.

UNDERSTANDING OF THE UNITED STATES²

[The United States Senate gave its advice and consent to the ratification of the treaty subject to the following understanding:]

It is the understanding of the United States that neither party is obligated, under Article III of the above Treaty, to come to the aid of the other except in case of an external armed attack against such party; nor shall anything in the present Treaty be construed as requiring the United States to give assistance to Korea except in the event of an armed attack against territory which has been recognized by the United States as lawfully brought under the administrative control of the Republic of Korea.

[The United States communicated the text of the understanding to the Republic of Korea in a note of January 28, 1954, acknowledged by the Republic of Korea in a note of February 1, 1954. The text of the understanding was included in the President's proclamation of November 17, 1954.]

24. JOINT STATEMENT BY THE SECRETARY OF STATE AND THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KOREA, AUGUST 8, 1953³

Our friendly and understanding consultations demonstrate clearly the determination of the United States and the Republic of Korea to stand together in cordial cooperation to achieve our common objectives, including the reunification of Korea.

¹ Ratifications were exchanged Nov. 17, 1954.

² TIAS 3097.

³ S. Exec. A, 83d Cong., 2d sess.

Lampiran 2

THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary

For Immediate Release June 16, 2009

JOINT VISION FOR THE ALLIANCE OF THE UNITED STATES OF
AMERICA AND THE
REPUBLIC OF KOREA
Washington, D.C.

June 16, 2009

The United States of America and the Republic of Korea are building an Alliance to ensure a peaceful, secure and prosperous future for the Korean Peninsula, the Asia-Pacific region, and the world.

Our open societies, our commitment to free democracy and a market economy, and our sustained partnership provide a foundation for the enduring friendship, shared values, and mutual respect that tightly bind the American and Korean peoples.

The bonds that underpin our Alliance and our partnership are strengthened and enriched by the close relationships among our citizens. We pledge to continue programs and efforts to build even closer ties between our societies, including cooperation among business, civic, cultural, academic, and other institutions.

The United States-Republic of Korea Mutual Defense Treaty remains the cornerstone of the U.S.-ROK security relationship, which has guaranteed peace and stability on the Korean Peninsula and in Northeast Asia for over fifty years. Over that time, our security Alliance has strengthened and our partnership has widened to encompass political, economic, social and cultural cooperation. Together, on this solid foundation, we will build a comprehensive strategic alliance of bilateral, regional and global scope, based on common values and mutual trust. Together, we will work shoulder-to-shoulder to tackle challenges facing both our nations on behalf of the next generation.

The Alliance is adapting to changes in the 21st Century security environment. We will maintain a robust defense posture, backed by allied capabilities which support both nations' security interests. The continuing commitment of extended deterrence, including the U.S. nuclear umbrella, reinforces this assurance. In advancing the bilateral plan for restructuring the Alliance, the Republic of Korea will take the lead role in the combined defense of Korea, supported by an

enduring and capable U.S. military force presence on the Korean Peninsula, in the region, and beyond.

We will continue to deepen our strong bilateral economic, trade and investment relations. We recognize that the Korea-U.S. (KORUS) Free Trade Agreement could further strengthen these ties and we are committed to working together to chart a way forward. We aim to make low-carbon green growth into a new engine for sustainable economic prosperity and will closely cooperate in this regard. We will strengthen civil space cooperation, and work closely together on clean energy research and the peaceful uses of nuclear energy.

Through our Alliance we aim to build a better future for all people on the Korean Peninsula, establishing a durable peace on the Peninsula and leading to peaceful reunification on the principles of free democracy and a market economy. We will work together to achieve the complete and verifiable elimination of North Korea's nuclear weapons and existing nuclear programs, as well as ballistic missile programs, and to promote respect for the fundamental human rights of the North Korean people.

In the Asia-Pacific region we will work jointly with regional institutions and partners to foster prosperity, keep the peace, and improve the daily lives of the people of the region. We believe that open societies and open economies create prosperity and support human dignity, and our nations and civic organizations will promote human rights, democracy, free markets, and trade and investment liberalization in the region. To enhance security in the Asia-Pacific, our governments will advocate for, and take part in, effective cooperative regional efforts to promote mutual understanding, confidence and transparency regarding security issues among the nations of the region.

Our governments and our citizens will work closely to address the global challenges of terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, piracy, organized crime and narcotics, climate change, poverty, infringement on human rights, energy security, and epidemic disease. The Alliance will enhance coordination on peacekeeping, post-conflict stabilization and development assistance, as is being undertaken in Iraq and Afghanistan. We will also strengthen coordination in multilateral mechanisms aimed at global economic recovery such as the G20.

The United States of America and the Republic of Korea will work to achieve our common Alliance goals through strategic cooperation at every level. Proven bilateral mechanisms such as the Security Consultative Meeting and the Strategic Consultations for Allied Partnership will remain central to realizing this shared vision for the Alliance.